



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

PERWAKILAN BPKP  
PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

*Hadir Bermanfaat dan  
Kian Bermakna untuk  
Indonesia Maju*







# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

PERWAKILAN BPKP  
PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

*Hadir Bermanfaat dan  
Kian Bermakna untuk  
Indonesia Maju*

Nomor : PE.12.03/LHP-8/PW24/6/2023

Tanggal : 09 Januari 2023



# MEET

# OU




# OUR TEAM



# KATA PENGANTAR





Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 secara tepat waktu. Penyusunan laporan kinerja dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja atas target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi peningkatan kinerja.

Dalam tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan pengawasan atas 93 topik pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 78 topik Agenda Prioritas Pengawasan (APP), 2 topik Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) dan 13 topik pengawasan dukungan/non prioritas lainnya. Pengawasan APPD dilaksanakan terkait Penanganan Bencana Angin Siklon Seroja dan Pengelolaan Penerimaan Asli Daerah Pajak Hotel Terapung di Labuan Bajo sebagai salah satu upaya BPKP dalam mengawal serta mendukung terwujudnya NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

Secara umum kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 210,31%. Dari 29 indikator kinerja kegiatan sebanyak 25 indikator (86,21%) mencapai target 100% atau lebih. Terhadap target kinerja yang capaiannya belum optimal menjadi perhatian untuk dilaksanakan strategi/rencana tindak perbaikan pada tahun 2023.

Kami berharap hasil pelaksanaan tugas dan layanan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang tergambar dalam Laporan Kinerja ini, mampu memberikan manfaat dan nilai tambah dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Hasil yang telah dicapai diharapkan juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur hadir bermanfaat dan kian bermakna bagi Indonesia khususnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 09 Januari 2023  
Kepala Perwakilan,



*Sofyan Antonius*

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## SK I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

401.90%

Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah
<b>Target</b> (Juta Rupiah) <b>1.386</b>	<b>Target</b> (Juta Rupiah) <b>844.657</b>	<b>Target</b> (Juta Rupiah) <b>3.280</b>
<b>Realisasi</b> (Juta Rupiah) <b>1.406</b>	<b>Realisasi</b> (Juta Rupiah) <b>852.627</b>	<b>Realisasi</b> (Juta Rupiah) <b>32.906</b>
<b>Capaian</b> <b>101.46%</b>	<b>Capaian</b> <b>100.94%</b>	<b>Capaian</b> <b>1003%</b>

## SK II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

114.22%

Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

**Target**  
(Persentase) **85%**

**Realisasi**  
(Persentase) **100%**

**Capaian**  
(Persentase) **117%**

Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

**Target**  
(Topik APPD) **2**

**Realisasi**  
(Topik APPD) **2**

**Capaian**  
(Persentase) **100%**

Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

**Target**  
(Persentase) **80%**

**Realisasi**  
(Persentase) **100%**

**Capaian**  
(Persentase) **125%**

## SK III: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

103.33%

Jumlah BUMD Dengan Kinerja Sehat

**Target**  
(BUMN) **8**

**Realisasi**  
(BUMN) **8**

**Capaian**  
(Persentase) **100%**

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

**Target**  
(Persentase) **2**

**Realisasi**  
(Persentase) **2**

**Capaian**  
(Persentase) **100%**

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

**Target**  
(BUMDes) **90**

**Realisasi**  
(BUMDes) **102**

**Capaian**  
(Persentase) **113%**

Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

**Target**  
(BUMDes) **2**

**Realisasi**  
(BUMDes) **2**

**Capaian**  
(Persentase) **100%**



## SK IV: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

106.25%

Hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Target (Persentase)	100%	Capaian	100%
Realisasi (Persentase)	100%		

Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Target (Pemda)	2	Capaian	2,584
Realisasi (Pemda)	-	Belu:	2,310

Hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Target (Juta Rupiah)	80%	Capaian	125%
Realisasi (Juta Rupiah)	100%		

Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK

Target (Pemda)	1	Capaian	200%
Realisasi (Pemda)	2		

## SK V: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

422.71%

APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3

1 Provinsi

Target

100%

1 Provinsi

Realisasi

APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3

4 Kabupaten/Kota

Target

100%

4 Kabupaten/Kota

Realisasi

Provinsi dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3

1 Provinsi

Target

Inspektorat Provinsi:

-

Realisasi

2,929

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3

3 Kabupaten/Kota

Target

66.7%

2 Kabupaten/Kota

Realisasi

Manggarai: 2,959

Pemda Kab/Kota dengan MRI  $>$  Level 3

1 Kabupaten/Kota

Target

Manggarai Barat:

-

Realisasi

2,584

Manggarai: 2,310

Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel

20 Desa

Target

2605%

521 Desa

Realisasi

Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

20 Desa

Target

410%

82 Desa

Realisasi

BLUD dengan MRI  $\geq$  Level 3

2 Desa

Target

100%

2 Desa

Realisasi

## SK VI: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

113.44%

Zona Integritas

112%

Target

75

Realisasi

84.34

IKPA

103%

Target

95

Realisasi

98.35

SAKIP

110%

Target

82

Realisasi

90.5

SPIP

135%

Target

70

Realisasi

94.87

Pengelolaan BMN

120%

Target

80

Realisasi

96.52

% Penyelesaian RTP (MRI)

100%

Target

100

Realisasi

100

Indeks Kepuasan Layanan

111%

Target

75

Realisasi

83.66

"Seluruh Sasaran Kegiatan telah tercapai secara efisien dari sisi Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (OH)"



## TIM PENYUSUN

*"Develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your results"*  
-Brian Tracy



# DAFTAR ISI

<b>i</b>	<b>Kata Pengantar, Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif</b>
<b>01</b>	<b>BAB I Pendahuluan</b>
<b>14</b>	<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>
<b>26</b>	<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>
<b>124</b>	<b>BAB IV Penutup</b>
<b>130</b>	<b>Lampiran</b>

# Evaluasi atas Tata Kelola Subsidi Pupuk



# Monitoring Paket Jalan Tanamori Dukungan Kegiatan Event Internasional Asian Summit 2023





# BAB I

# PENDAHULUAN

- Tugas dan Fungsi Organisasi
- Struktur Organisasi
- Aspek Strategis Organisasi
- Kegiatan dan Produk Organisasi
- Sistematika Penyajian

Tugas Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

Tugas dan fungsi BPKP, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, dan sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

### A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan



5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
3. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
5. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
9. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan
10. Pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

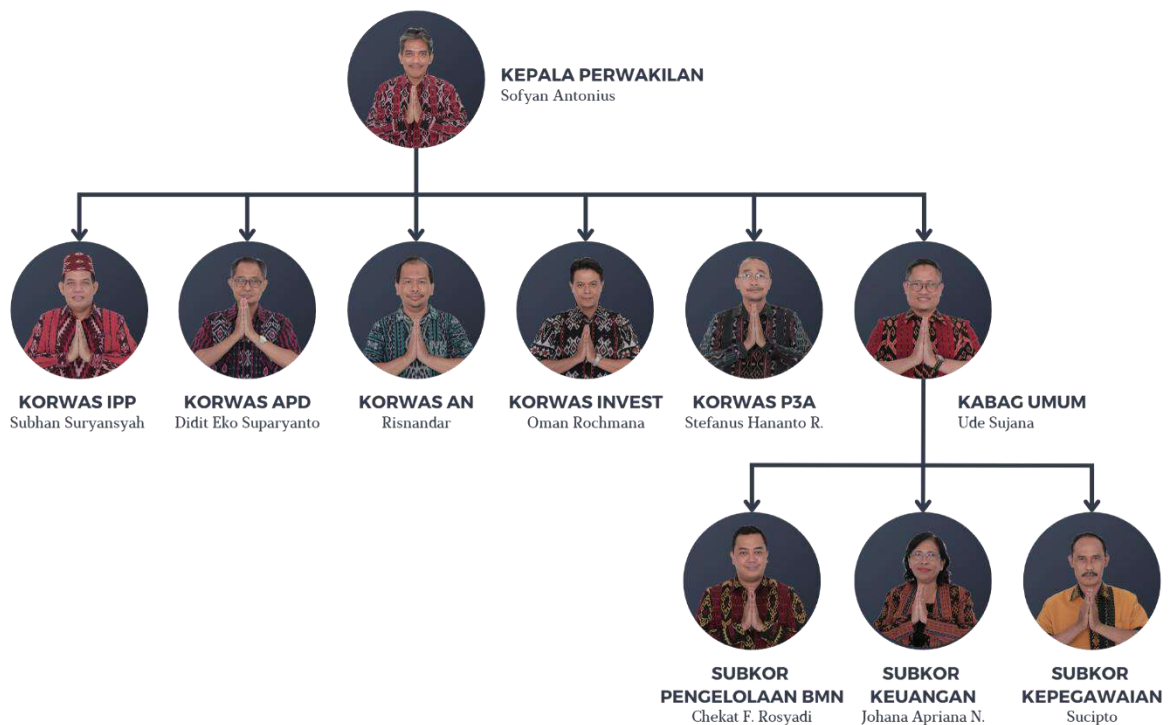
1. Bagian Umum yang membawahi Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Subkoordinator Kepegawaian, dan Subkoordinator Keuangan
2. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
3. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
4. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN)
5. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi



6. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3APIP)

Secara grafis, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



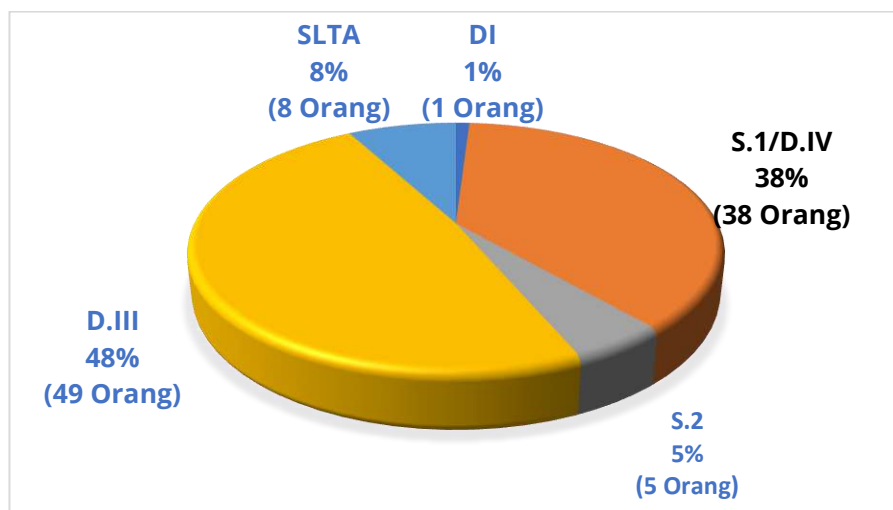
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia yang andal dan kompeten. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 101 orang yang telah mendukung capaian kinerja selama tahun 2022, dengan komposisi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai Tahun 2022**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persen (%)</b>
Pejabat Struktural	<b>2</b>	<b>1,98</b>
Sub Koordinator	<b>3</b>	<b>2,97</b>
Koordinator Pengawasan	<b>5</b>	<b>4,95</b>
Pejabat Fungsional Auditor	<b>74</b>	<b>73,27</b>
Pejabat Fungsional Umum	<b>13</b>	<b>12,87</b>
Arsiparis	<b>2</b>	<b>1,98</b>
Analisis Kepegawaian	<b>2</b>	<b>1,98</b>
Jumlah	<b>101</b>	<b>100</b>

**Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Gambar 1.2.**

**Gambar 1.2**  
**Jenjang Pendidikan Pegawai**  
**BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur**



### **C. Aspek Strategis Organisasi**

BPKP sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya, selain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional juga menjalankan mandat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai Auditor Internal Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat

dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektifitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat menunjukkan kinerja yang optimal sebagai Auditor Internal Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden di daerah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:

1. *Product Differences*

Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 dan Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral).

2. *Market Differences*

BPKP perlu mengenali dengan baik siapa *market*-nya. Hal ini dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi *stakeholders* entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. *Methodology Differences*

Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program *evaluations, policy evaluations, forensic audit, performance audit, internal control review* perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP.

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 serta Instruksi Presiden 9 Tahun 2014, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan

membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama BPKP adalah peran *Assurance* (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) dan *Consulting* (Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Asistensi).

#### **D. Kegiatan dan Produk Organisasi**

Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan layanan kepada *stakeholders* dengan melakukan pengawasan baik yang bersifat *assurance* maupun *consulting*. Pada tahun 2022 Perwakilan BPKP melakukan pengawasan pelaksanaan atas 93 topik Pengawasan terdiri dari 78 topik Agenda Prioritas Pengawasan (APP), 2 topik Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) dan 13 topik Pengawasan Dukungan/ Non Prioritas Lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang seluruhnya menghasilkan *output* sebanyak 87 sintesa hasil pengawasan (SHP) atas topik pengawasan dan laporan atas 6 topik dukungan pengawasan/non prioritas.

Topik pengawasan APP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, penanganan covid 19 (vaksin, klaim Rumah Sakit, PBJ Almatkes), stunting, Implementasi Bantuan Sosial APBN/APBD/APBDes, Pengawasan Badan Usaha Jasa Air dan Bank Pembangunan



Daerah (BPD), BLUD Kesehatan dan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah, Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dan lain-lain.

Pengawasan tematik daerah dalam 2 topik pengawasan APPD terdiri dari Pengawasan atas Penanganan Bencana Angin Siklon Seroja dan Pengawasan atas Pengelolaan Penerimaan Asli Daerah atas Pajak Hotel Terapung di Labuan Bajo.

Produk Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP seperti yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan berbagai produk unggulan lainnya yaitu:

1. *Financial Management Information System (FMIS)*;
2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes);
3. Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM) dan Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDes);
4. Aplikasi Evaluasi Mandiri Secara Elektronik Atas Kinerja BUMD Air Minum Berbasis *Cloud (e-BUM Cloud)* dan Aplikasi Forsa BLUD-Penatausahaan
5. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (*Performance Enhancement Program*);
6. Program Pengembangan GCG BUMD;
7. Program Pengembangan *Internal Control* BUMD berbasis COSO;
8. Program Anti Korupsi;
9. *Fraud Control Plan (FCP)* dan *Fraud Risk Assessment (FRA)*
10. Peningkatan Maturitas SPIP, Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) melalui pengawasan SPIP terintegrasi; dan
11. Peningkatan Kapabilitas APIP.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2022 yang diukur dan dinilai

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Renstra Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024, yang pada perkembangannya dapat mengalami berbagai penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dikaitkan dengan perkiraan iklim pembangunan ke depan. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
**Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**  
**Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur**



# Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP Menuju Level 3







# **BAB II** **PERENCANAAN**

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja

Dalam rangka penyelarasan kinerja organisasi, proses perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada perencanaan kinerja BPKP Pusat untuk menjamin bahwa kegiatan pengawasan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan khususnya dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian kinerja organisasi BPKP secara utuh.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2021 dan kondisi pandemi Covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini, menuntut BPKP untuk terus berupaya merumuskan dan merancang strategi-strategi yang inovatif agar tetap dapat memberikan kinerja terbaik khususnya dalam pengawasan pembangunan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk memberikan layanan pembinaan yang berkualitas bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan arahan dari kantor pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai penyesuaian dan penajaman indikator serta target – target kinerja dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang dan fokus pembangunan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, di tetapkan Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor S-750/PW24/6/2020 tanggal 4 September 2020.

## 1. Visi

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Pernyataan visi mempunyai makna bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan memberikan kontribusi bagi *stakeholder* melalui strategi pengawasan yang *pre-emptif* (Konsultansi), *preventif* (Pencegahan), dan *represif* (Penegakan Hukum).

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan Misi sebagai berikut:

### a. Misi 1

“Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

### b. Misi 2

“Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas”

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan dua tujuan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024, yaitu:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Tujuan yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut dalam 6 (enam) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai. Keenam sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah</b>					
	<b>IKK1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi</b>	<b>64</b>	<b>204</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi	-	-	-	-	-
	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD	64	204	255	255	255
	<b>IKK2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi</b>	<b>127</b>	<b>340</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
	Potensi Penerimaan Negara yang Dioptimalisasi	-	-	-	-	-
	Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah	127	340	425	425	425
	<b>IKK3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah</b>	<b>1.123</b>	<b>186.779</b>	<b>154.487</b>	<b>136.270</b>	<b>112.930</b>
	Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah	-	185.428	152.978	134.621	111.062
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	1.123	1.351	1.509	1.649	1.868

Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	IKK4: Nilai penyelamatan keuangan Negara	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
	IKK5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	-	118	120	122	125
	IKK6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	-	59	60	61	62
Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>					
	IKK7: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	0	0	0	0	0
	IKK8: Jumlah KP yang diawasi	7	7	7	7	7
	IKK9: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	7	7	7	7	7
	IKK10: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	0	0	0	0	0
	IKK11: Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	0	1	1	1	1
	IKK12: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	0,00%	12,50%	18,75%	31,25%	37,50%
	IKK13: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>				
IKK14: Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik		0	0	0	0	0
Persentase BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IKK15: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik		0	0	0	0	1
Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%
IKK16: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat		8	8	9	9	9
Persentase BUMD dengan kinerja sehat		21,05%	21,05%	23,68%	23,68%	23,68%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>IKK17: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat</b>	2	2	2	2	2
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%
	<b>IKK18: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan</b>	26	33	40	50	56
<b>Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>					
	<b>IKK19: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>IKK20: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>	70%	75%	80%	85%	90%
	<b>IKK21: Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik</b>	0	0	2	3	4
	<b>IKK22: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik</b>	0	0	1	1	2
<b>Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU</b>	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU</b>					
	<b>IKK23: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP <math>\geq</math> Level 3</b>	5	7	9	12	13
	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	21,74%	30%	39%	52%	57%
	<b>IKK24: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP <math>\geq</math> Level 3</b>	4	5	6	6	8
	Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	17,39%	21,74%	26,09%	26,09%	34,78%
	<b>IKK25: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	0	0	0	0	0
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	0%	0%	0%	0%	0%
	<b>IKK26: Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	0	1	2	3	4

Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	0%	4,55%	9,09%	13,64%	18,18%
	<b>IKK27: Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,92%</b>
	<b>IKK28: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>IKK29: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</b>	<b>35,01%</b>	<b>39,99%</b>	<b>44,99%</b>	<b>50,00%</b>	<b>55,01%</b>
	<b>IKK30: Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>148</b>	<b>300</b>	<b>592</b>
	<b>IKK31: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	<b>IKK32: Jumlah BUMN dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Persentase BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>IKK33: Jumlah BUMD dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	Persentase BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%
	<b>IKK34: Jumlah BLUD dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Persentase BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	0,00%	0,00%	12,50%	18,75%	18,75%
	<b>IKK35: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	Persentase BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%
	<b>IKK36: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	Persentase BLUD dengan Kapabilitas Satuan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengawasan Intern $\geq$ Level 3					
Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas</b>					
	IKK37: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	75	76	77	78	79
	IKK38: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	IKK39: Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	IKK40: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	IKK41: Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	86	87	88	89	90
	IKK42: Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	95,00%
	IKK43: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	IKK44: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	IKK45: Nilai SAKIP Unit Kerja	80	81	82	83	84
	IKK46: Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	IKK47: Indeks MR Unit Kerja		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	IKK48: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	70	76	80	81	82

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2021 dan dilakukan revisi perjanjian kinerja yang ditetapkan tanggal 30 September 2022 sebagai komitmen untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Target kinerja tahun 2022 dijabarkan dan didukung



pelaksanaan kegiatan pengawasan atas 93 topik Pengawasan terdiri dari 78 topik Agenda Prioritas Pengawasan (APP), 2 topik Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) dan 13 topik Pengawasan Dukungan/ Non Prioritas Lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	
				Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai Optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	1.386
		2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	844.657
		3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	3.280
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
		2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasai	Kegiatan Prioritas Daerah	2
		3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atau Badan Usaha	1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	8
		2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2
		3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	90
		4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80
		3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	2
		4	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Prov	1
		2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	4

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	
				Satuan	Target
		3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Prov	1
		4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	3
		5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	1
		6	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20
		7	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20
		8	Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	2
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		3	Persentase efektivitas pengendalian intern unit kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70
		4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah melalui proses revisi sehingga berbeda dengan target kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2020-2024. Namun atas target kinerja tahun 2022 yang direvisi belum seluruhnya diikuti dengan penyesuaian target kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dalam Renstra 2020-2024. Penyesuaian target 2023 dan 2024 menunggu arahan mekanisme penyesuaian dari Kantor Pusat (Unit Rendal dan Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola). Dengan demikian dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2022 ini perbandingan

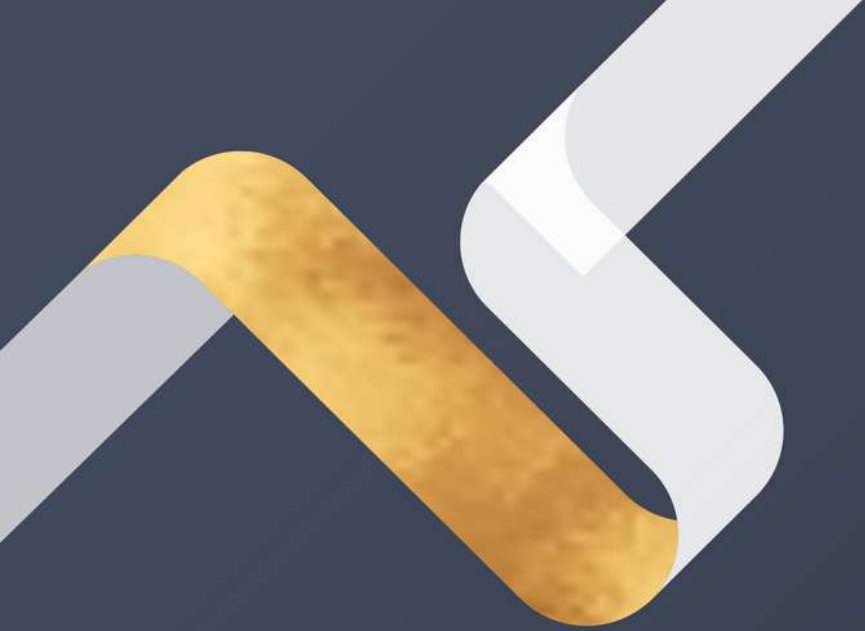
realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja pada akhir tahun Renstra (Tahun 2024) hanya dilakukan atas target Indikator Kinerja Kegiatan yang masih relevan untuk diperbandingkan.

## Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor



## Evaluasi Kinerja PDAM





# BAB III

# AKUNTABILITAS

- Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja Tahun 2022
- Kinerja Lainnya Tahun 2022

### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tahun 2022 dibandingkan dengan target setiap IKK sehingga diperoleh nilai capaian kinerja pada setiap sasaran kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian target IKK dihitung menggunakan rumus *maximize*, sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan nilai capaian kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala pencapaian target ataupun faktor pendukung keberhasilan kinerja dan strategi untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan nilai capaian kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala pencapaian target ataupun faktor pendukung keberhasilan kinerja. Perbandingan kinerja dilakukan dengan kinerja tahun 2021. Perbandingan dengan target tahun 2024 tidak dilakukan pada beberapa target kinerja yang direvisi pada tahun 2022 namun belum diikuti revisi target 2023 dan 2024 sehingga tidak relevan untuk diperbandingkan, namun analisis terkait pencapaian target kinerja tahun 2024 diuraikan pada setiap IKK Kegiatan (IKK). Selain itu diuraikan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya pada setiap IKK.

Selain analisis capaian kinerja, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi pada setiap sasaran kegiatan dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya, baik dana maupun sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Analisis efisiensi dilakukan hanya apabila rata-rata capaian sasaran kegiatan telah mencapai/ melampaui 100%;

2. Apabila rata-rata capaian sasaran kegiatan telah mencapai/ melampaui 100%, dan rata-rata capaian output lebih tinggi dari capaian anggaran/ SDM, maka penggunaan anggaran/ SDM telah efisien;
3. Apabila rata-rata capaian sasaran kegiatan telah mencapai/ melampaui 100%, dan rata-rata capaian output lebih rendah dari capaian anggaran/ SDM, maka penggunaan anggaran/ SDM belum efisien.

Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

## B. Capaian Kinerja Tahun 2022

### 1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT atas 6 sasaran kegiatan dilengkapi dengan 29 IKK, menunjukkan bahwa 25 IKK (86,21%) telah mencapai target dan 4 IKK (13,79%) belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing IKK pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2022**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK KINERJA							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
1	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah</b>							
	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	127	1.386	1.406	101,46	●
	1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	361.499	844.657	852.626	100,94	●
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	20.392	3.280	32.907	1.003,30	●
	Rata-rata capaian sasaran 1						401,90	
2	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>							
	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	N/A	85	100	117,65	●
	2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	2	100,00	●

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK KINERJA							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
	2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	80	100	125	●
							Rata-rata capaian sasaran 2	114,22
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>							
	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	8	8	8	100,00	●
	3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3	2	2	100,00	●
	3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	62	90	102	113,33	●
	3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	N/A	2	2	100,00	●
							Rata-rata capaian sasaran 3	103,33
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>							
	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	100	●
	4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	80	100	125	●
	4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	N/A	2	0	0	●
	4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	N/A	1	2	200	●
							Rata-rata capaian sasaran 4	106,25
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU</b>							
	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	0	1	1	100	●
	5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/kota	3	4	4	100	●
	5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	0	1	0	0,00	●
	5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/kota	2	3	2	66,67	●
	5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	-	1	0	0,00	●
	5.6	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	-	20	521	2605	●



No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK KINERJA							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
	5.7	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	5	20	82	410,00	●
	5.8	Jumlah BLU/D dengan MRI ≥ Level 3	BLU / D	-	2	2	100,00	●
	Rata-rata capaian sasaran 5						422,71	
<b>6</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja</b>							
	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85,52	75	84,34	112,45	●
	6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	87,21	82	90,5	110,37	●
	6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern unit kerja (SPIP Unit kerja)	Persen	94,12	70	94,87	135,53	●
	6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	100	100	100,00	●
	6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	92,55	75	83,66	111,55	●
	6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	87	95	98,35	103,53	●
	6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	84,64	80	96,52	121,00	●
	Rata-rata capaian sasaran 6						113,44	
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>210,31</b>	

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu; ● = belum mencapai target

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP NTT Tahun 2022 sebesar 210,31 Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT didukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pada 93 topik pengawasan terdiri dari 78 topik Agenda Prioritas Pemerintah (APP), 2 topik Agenda Pengawasan Prioritas Daerah (APPD), dan 13 topik pengawasan Non Prioritas/dukungan pengawasan.

## 2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi NTT atas target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**a. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

Kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” diukur melalui 3 IKK kegiatan (IKK) yaitu:

- 1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi;
- 2) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara Dan Daerah;
- 3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara Dan Daerah.

Ringkasan capaian kinerja sasaran kegiatan 1 disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	
1	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah</b>							
	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	127	1.386	1.406	101,46	●
	1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	361.499	844.657	852.627	100,94	●
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	20.392	3.280	32.907	1.003,26	●
<b>Capaian Rata-Rata</b>							401,90	

Tabel 3.2. menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 sebesar 401,90%. Uraian kinerja atas 3 IKK sasaran “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah” adalah sebagai berikut:

**1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi**

IKK “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” merupakan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP berupa Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya untuk penerimaan negara adalah pajak, bea

dan cukai, PNBP serta sumber penerimaan lainnya. Sedangkan untuk penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan. Misalnya: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.406.169.908,50 atau tercapai 101,46% dari target tahun 2022 sebesar Rp1.386.000.000,00.

Ringkasan Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak	1.400.253.333,50
2	Retribusi	5.916.575,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.406.169.908,50</b>

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tersebut diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) berupa optimalisasi PAD yang sudah ditindaklanjuti dengan penetapan kurang bayar atas pendapatan asli daerah. dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan atas Optimalisasi PAD pada Pemerintah Kabupaten Alor dengan nilai optimalisasi yang terealisasi sebesar Rp130.144.944,00;

- b) Pengawasan atas Optimalisasi PAD pada Pemerintah Kabupaten Belu Dengan nilai optimalisasi yang terealisasi sebesar Rp141.161.265,50;
- c) Pengawasan atas Optimalisasi PAD pajak hotel terapung pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp1.134.863.699,00.



Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.279.399.908,50 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp126.770.000,00. Perbandingan kinerja dengan tahun 2024 tidak dilakukan karena target kinerja tahun 2024 belum direvisi, namun kondisi capaian kinerja yang sudah memadai di tahun 2022 agar dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga target kinerja tahun berikutnya dapat tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Mulai bangkitnya sektor-sektor perekonomian sebagai sumber PAD dengan beroperasinya hotel-hotel, tempat hiburan, dan restoran yang sempat lumpuh akibat pandemi Covid-19;
- b) Pengawasan yang dilakukan melalui evaluasi OPAD telah cukup efektif dalam mendukung capaian Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja antara lain:

- a) Melakukan penyusunan rancangan pedoman teknis pengawasan pengelolaan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) atas Pajak Hotel Kapal Terapung di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat menjadi acuan pengawasan oleh APIP daerah;
- b) Monitoring realisasi potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui aplikasi [siera.bpkp.go.id/opad](http://siera.bpkp.go.id/opad);
- c) Melakukan evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli pada Pemerintah Daerah.

Strategi ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang persuasif dan efektif dengan Pemerintah Daerah serta bersinergi dengan APIP Daerah, baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan penerimaan daerah;
- b) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah.
- c) Melakukan evaluasi atas penerimaan daerah dengan melihat setiap proses yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam

rangka melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Proses-proses tersebut meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan, kemudian menentukan tahapan yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Serta tata kelola pada OPD yang mengelola penerimaan daerah, untuk dievaluasi apakah setiap unsur dalam OPD tersebut sudah memiliki peran yang optimal dalam pengelolaan penerimaan daerah.

## 2) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara” merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT. IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara” diukur dengan melihat:

- a) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
  - (1) Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;
  - (2) Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
  - (3) Ukuran/IKK keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- b) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dan lain-lain.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah Tahun 2022 sebesar Rp852.626.935.868,63 atau tercapai sebesar 100,94% dari target Tahun 2022 sebesar Rp844.657.000.000,00

Nilai tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT, sebagaimana pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah**  
**Tahun 2022**

No	Bidang Pengawasan	Nilai (Rp)
1	Instansi Pemerintah Pusat	1.531.307.000,00
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	844.657.221.840,00
3	Investigasi	6.438.407.028,63
	Jumlah	852.626.935.868,63

Nilai efisiensi pada tabel di atas diperoleh dari penugasan sebagai berikut;

- a) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) sebesar Rp1.531.307.000,00 diperoleh dari kegiatan Audit Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) akibat Badai Siklon Tropis Seroja pada satu kabupaten.
- b) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah nilai efisiensi sebesar Rp844.657.221.840,00 diperoleh dari kegiatan evaluasi perencanaan penganggaran yang dilaksanakan pada 3 Pemerintah Daerah, dengan hasil nilai tidak efisien sebesar Rp190.575.330.784,00 dan nilai tidak efektif sebesar Rp654.081.891.056,00
- c) Bidang Investigasi realisasi sebesar Rp6.438.407.028,63 dari hasil pengawasan
  - (1) Audit Klaim atas Tambahan Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja Pada Infrastruktur Irigasi tahun 2021 pada 2 kabupaten dengan nilai efisiensi Rp286.490.209,63;

(2) Audit Penyesuaian Harga atas Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021 pada satu kabupaten, dengan nilai efisiensi Rp6.151.916.819,00.



Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp852.265.436.868,63 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp361.499.000,00. Perbandingan kinerja dengan tahun 2024 tidak dilakukan karena target kinerja tahun 2024 belum direvisi, namun kondisi capaian kinerja yang sudah memadai di tahun 2022 agar dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga target kinerja tahun berikutnya dapat tercapai.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja antara lain;

- a) Kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi NTT sudah memadai sehingga dapat mengidentifikasi potensi nilai efisiensi yang cukup tinggi.
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana sesuai Standar Audit Intern Pemerintah;



- c) Komitmen dan Koordinasi pihak *stakeholder* dengan tim pengawasan berjalan dengan baik;
- d) Kesesuaian desain dan metodologi pengawasan untuk mendukung capaian kinerja nilai efisiensi pengeluaran negara.

Strategi ke depan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke *stakeholder* melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;
- c) Meningkatkan kualitas pengawasan dengan melaksanakan pengawasan secara kolaboratif.

### **3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah**

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” merupakan nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas Negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” diukur dengan Nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah Tahun 2022 sebesar Rp32.906.588.759,42 atau tercapai sebesar 1.003,30% dari target tahun 2022 sebesar Rp3.280.000.000,00.

Nilai tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat sebesar Rp919.507.872,00 dan Bidang Pengawasan Investigasi sebesar Rp31.987.080.887,42.

Nilai penyelamatan keuangan negara pada Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat terdiri dari:

a) Nilai penyelamatan keuangan negara dengan sumber pendanaan DIPA Perwakilan BPKP NTT sebesar Rp303.515.744,00.

Kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian IKK ini adalah:

- (1) Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 3 Pemda;
- (2) Audit atas Laporan Keuangan *Dam Operational and Safety Project Phase II (DOISP II) Loan IBRD 8711-ID dan AIIB 00010-1 (IDN,)* untuk TA yang Berakhir per 31 Desember 2021; pada satu Pemda;
- (3) Audit atas Laporan Keuangan *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project/Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III) Loan ID 8578* untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (4) Audit atas Laporan Keuangan *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project/Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III) Loan ID 8578* untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (5) Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/ *National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan AIIB 0004-IDN* Tahun Anggaran 2021.

b) Nilai penyelamatan keuangan negara dengan sumber pendanaan Mitra Pusat BPKP dan Mitra Perwakilan sebesar Rp615.992.128,00.

Kegiatan pengawasan dengan sumber dana Mitra Pusat BPKP dan Mitra Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang mendukung untuk pencapaian IKK “nilai penyelamatan keuangan negara” yaitu:

- (1) Audit atas Laporan Keuangan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) Loan IFAD No.2000001445 untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2021;
- (2) Audit atas Laporan Keuangan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) Loan IFAD No.2000001445 untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2021;
- (3) Audit pada Paket Penanganan Infrastruktur Akibat Badai Siklon Seroja Sektor Bangunan Gedung; dan
- (4) Audit atas Paket Penanganan Infrastruktur Akibat Badai Siklon Tropis Seroja Sektor Bangunan Gedung.

Sedangkan pada Bidang Investigasi nilai penyelamatan keuangan Negara/daerah tahun 2022 sebesar Rp31.987.080.887,42 diperoleh dari 10 (sepuluh) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kabupaten Nagekeo, Alor, Timor Tengah Selatan, Kupang, Timor Tengah Utara, Flores Timur, Malaka dan Manggarai Barat.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh:

- a) Kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) SDM telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penugasan;

- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana sesuai Standar Audit Intern Pemerintah;
- c) Kesesuaian desain dan metodologi pengawasan untuk mendukung capaian kinerja nilai efisiensi pengeluaran negara
- d) Komitmen dan kerjasama pihak *stakeholder* dengan tim pengawasan berjalan dengan baik;
- e) Komitmen APH di lingkungan Provinsi NTT untuk memberantas korupsi;
- f) Telah tersedia pedoman dalam melaksanakan penugasan, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI);
  - (2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan audit investigatif, PKKN, pemberian keterangan ahli bagi seluruh auditor BPKP.

Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.515.081.230,42 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp20.391.507.529,00. Perbandingan kinerja dengan tahun 2024 tidak dilakukan karena target kinerja tahun 2024 belum direvisi, namun kondisi capaian kinerja yang sudah memadai di tahun 2022 agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga target kinerja tahun berikutnya dapat tercapai.

Strategi ke depan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan diklat;
- b) Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pengawasan kolaboratif;

- c) Meningkatkan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke stakeholder melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;
- d) Melakukan ekspose kasus sebelum penugasan audit investigasi untuk memastikan kasus tersebut telah memenuhi 3 (tiga) unsur dari 5W+1H dan bukti yang dimiliki oleh APH telah cukup;
- e) Melakukan koordinasi secara intensif kepada APH.



Rata-rata capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” sebesar 401,90%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung

dengan realisasi *output* sebanyak 44 Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) atas Topik dan 5 laporan hasil pengawasan non prioritas/dukungan atau tercapai 100,00% dari target *output* sebanyak 44 SHP atas Topik dan 5 laporan hasil pengawasan non prioritas/dukungan. Anggaran kegiatan sebesar Rp3.623.336.144,00 dengan realisasi sebesar Rp3.554.794.846,00 atau 98,11% dari anggaran sedangkan penggunaan SDM sebanyak 15.901 OH atau 98,68% dari target 16.113 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian dana sebesar 98,11% dan capaian OH sebesar 98,68%.

**b. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional**

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” diukur dengan menggunakan 3 IKK yaitu:

- 1) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan;
- 2) Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi
- 3) Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti

Ringkasan capaian kinerja sasaran kegiatan 2 disajikan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 2**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Ket er a n g a n
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
2	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>							
	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	N/A	85	100	117,65	●
	2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Kegiata n Prioritas Daerah	2	2	2	100	●
	2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	80	100	125	●
Capaian Rata-Rata							114,22	

Tabel 3.5. menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 sebesar 114,22%. Uraian kinerja atas 3 IKK pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” adalah sebagai berikut:

## 1) Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselesaikan

IKK "Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselesaikan" terkait dengan penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). HKP didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Secara konkret,



HKP terjadi manakala dispute di antara dua atau lebih pihak atas suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan Penugasan EHKP tersebut pada dasarnya adalah *case-based* yang bersumber dari pengembangan hasil pengawasan, *current issues*, atau permintaan instansi/BU. Penugasan EHKP adalah salah satu pewujudan Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

HKP yang diselesaikan diartikan sebagai hasil penugasan EHKP yang berhasil membuahkan kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan terhadap hilangnya hambatan dan terlaksananya kesepakatan tersebut berupa pemilihan langkah penyelesaian dari alternatif penyelesaian yang dihasilkan berkat mediasi dan evaluasi yang dilakukan BPKP.

IKK “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” diukur dengan membandingkan hasil penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang efektif (keepakatan penyelesaian hambatan terwujud dan dilaksanakan) terhadap total penugasan HKP.

Realisasi hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan tahun 2022 sebesar 100% atau mencapai sebesar 117,65% dari target tahun 2022 sebesar 85%.

Jumlah penugasan EHKP tahun 2022 sebanyak 1 penugasan yaitu EHKP atas Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja Pada Infrastruktur Irigasi di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 dan rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 karena kinerja tersebut tidak ditargetkan pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 85% maka realisasi tahun 2022 sebesar 100% telah melampaui target 2024, dengan demikian pada tahun 2024 target kinerja diyakini dapat tercapai.

Tercapainya target kinerja antara lain didukung oleh:

- a) Kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) SDM bidang Investigasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penugasan;
- b) Telah tersedia pedoman dalam melaksanakan penugasan, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI);



(2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan audit investigatif, PKKN, pemberian keterangan ahli bagi seluruh auditor BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan peningkatan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke *stakeholder* melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;

## **2) Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi**

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah Sintesa Hasil Pengawasan APPD yang dilaporkan.

Target kinerja ini pada Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dengan realisasi sebanyak 2 kegiatan atau tercapai 100% dari target. Capaian tersebut merupakan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Pusat berupa:

a) Pengawasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Pajak Hotel Terapung, di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat disebutkan pajak hotel di atas kapal wisata adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa-jasa penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.

Dari hasil pengawasan tersebut disampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

- (1) Bapenda Kabupaten Manggarai Barat agar:
  - (a) Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun *draft* revisi Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 58 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata.
  - (b) Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun *draft* Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mengakomodir secara jelas (tidak menimbulkan multi tafsir) apabila dilakukan pengenaan pajak hotel atas kapal *trip* serta merumuskan teknis pengawasan atas kapal *trip* dengan melibatkan instansi terkait.
  - (c) Menyusun *database* Wajib Pajak Hotel di atas kapal wisata dan pajak restoran di atas kapal wisata serta mewajibkan pengusaha kapal wisata untuk memiliki NPWPD.
  - (d) Menetapkan target PAD pendapatan pajak hotel di atas kapal wisata dan pajak restoran di atas kapal wisata sebesar nilai potensi pendapatan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- (2) Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat merumuskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan peraturan turunannya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga daerah dapat membuat Peraturan Daerah terkait

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mengakomodir adanya pajak serta retribusi daerah yang bersifat spesifik pada suatu daerah.

(3) Mengusulkan kepada Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dapat mengakomodir adanya Pajak Hotel Kapal Terapung/Kapal Wisata/Kapal *Trip* sebagai salah satu objek pajak yang dikenakan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b) Evaluasi Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja pada Provinsi NTT. Dimana Pemerintah menyediakan pendanaan penanganan bencana seroja senilai Rp2.695.321.598.297,00, meliputi perbaikan infrastruktur di 16 Kabupaten/Kota, pembangunan rumah relokasi bagi korban bencana sebanyak 3.812 unit di 27 lokasi, penyaluran bantuan stimulus untuk 53.400 KK, bantuan dana tunggu hunian untuk 6.313 KK, dan donasi tunai pihak ketiga yang disalurkan ke 18 Kabupaten/Kota.

Penugasan pengawasan yang mendukung pencapaian kinerja “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” terdiri dari:

(1) Survei pendahuluan terkait evaluasi akuntabilitas penanganan bencana angin siklon seroja pada Provinsi NTT, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang;

- (2) Penyusunan pedoman pengawasan penanganan bencana angin siklon seroja;
- (3) Evaluasi penanganan bencana siklon tropis seroja pada Provinsi NTT, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang;

Dari hasil pengawasan tersebut disampaikan saran perbaikan kepada Gubernur Provinsi NTT, yaitu:

- (1) Mendorong Bupati/Walikota di Provinsi NTT agar:
  - (a) Mengalokasikan anggaran yang memadai pada masing-masing APBD untuk mendukung kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Rumah dan Bantuan Relokasi Hunian Masyarakat Terdampak.
  - (b) Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko fraud penyaluran dana stimulan rumah dan penempatan warga di lokasi relokasi, serta mendokumentasikan, meningkatkan pengendalian intern dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja.
  - (c) Memperbaiki strategi untuk mengatasi hambatan dan percepatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Relokasi Hunian Masyarakat Terdampak.
  - (d) Menyusun kebijakan komprehensif guna mendukung resiliensi dan pemulihan ekonomi pasca bencana bagi warga terdampak bencana.
- (2) Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Perumahan NTT, Balai Prasarana Permukiman NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II agar:

- (a) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur relokasi hunian.
- (b) Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko fraud atas Pengadaan Barang/Jasa pembangunan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana dan mendokumentasikannya, serta meningkatkan pengendalian intern dan akuntabilitas atas Pengadaan Barang/Jasa.
- (c) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam mengatasi hambatan pembangunan Relokasi Hunian Masyarakat Terdampak.
- (d) Memberdayakan tenaga lokal khususnya warga terdampak dan penggunaan produk lokal dalam kegiatan pembangunan relokasi untuk mendukung resiliensi dan pemulihan ekonomi pasca bencana bagi warga terdampak bencana.

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi”, merupakan IKK baru yang ditetapkan pada Tahun 2022, sehingga realisasi kinerja Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2021 dan untuk target tahun 2024 belum ditetapkan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- (1) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana sesuai Standar Audit Intern Pemerintah;
- (2) Komitmen dan kerjasama pihak *stakeholder* dengan tim pengawasan berjalan dengan baik.

- (3) Kesesuaian desain dan metodologi pengawasan untuk mendukung capaian kinerja jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi.
- (4) Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam merumuskan pedoman pengawasan optimalisasi PAD atas Pajak Hotel Terapung sehingga dapat digunakan oleh APIP untuk melakukan pengawasan atas realisasi PAD atas Pajak Hotel Terapung.

Strategi ke depan untuk meningkatkan kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT antara lain:

- (1) Meningkatkan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke *stakeholder* melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;
- (2) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengusulkan peserta diklat terkait APP dan APPD;
- (3) Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pengawasan sinergi kolaboratif;
- (4) Melakukan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pengawasan optimalisasi PAD atas Pajak Hotel Terapung kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.

### **3) Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti**

IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti” merupakan rekomendasi yang mengarah pada upaya untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko/*Governance Risk Control* serta perbaikan tata kelola yang disampaikan kepada Gubernur

Provinsi NTT melalui Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP setiap tahunnya.

Dari hasil pengawasan tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi NTT menyampaikan 30 rekomendasi strategis kepada Gubernur Provinsi NTT dan seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti oleh Gubernur melalui surat Sekretaris Daerah kepada Bupati/Walikota dan Pimpinan OPD terkait. Dengan demikian realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti” sebesar 100% atau mencapai 125% dari target 100%.

Rekomendasi strategis yang disampaikan meliputi rekomendasi terkait program-program sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	Jumlah rekomendasi
1	Program Vaksinasi	2
2	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial. Tunai (BST) dan Kartu Sembako	1
3	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	2
4	BLT Kemiskinan Ekstrem	1
5	Perencanaan dan Penganggaran APBD	2
6	SPIP Terintegrasi (SPIP.MR.IEPK)	5
7	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	5
8	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1
9	Pengawasan atas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP)	1
10	Pengawasan Penurunan Stunting	1
11	Program Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah	1
12	Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Pariwisata	1
13	Tata Kelola Penanggulangan Bencana	3
14	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Labuan Bajo	3
15	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah	1
Jumlah Rekomendasi		30

Rincian rekomendasi dan tindaklanjutnya sebagaimana disajikan pada lampiran 5.

IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti” merupakan IKK baru dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga tidak dilakukan perbandingan dengan realisasi IKK Perjanjian Kinerja tahun 2021. IKK ini juga belum ditentukan targetnya pada tahun 2024, namun Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan terus melakukan upaya pengawalan agar rekomendasi strategis yang disampaikan setiap tahunnya dapat ditindak lanjuti 100%.

Dalam mendukung capaian kinerja “Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti” Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan pengawasan pada program-program terkait selama tahun 2022 dan penyusunan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022. Ikhtisar hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur Provinsi NTT melalui Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor SPM-147/D4/05/2022 Tanggal 9 Februari 2022 tentang Laporan Hasil Pengawasan BPKP di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2021 terkait laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor LAP-29/PW24/6/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal laporan hasil pengawasan tahun 2021 pada Provinsi NTT.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja antara lain:

- a) Komitmen Gubernur untuk melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT;
- b) Terjalinnnya sinergi, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi NTT dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mengawal proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.



Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:

- a) Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan secara berkala;
- b) Berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mengawal percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP.

Untuk meningkatkan kinerja yang akan datang Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan:

- a) Merancang kembali substansi ikhtisar hasil pengawasan agar rekomendasi yang disampaikan fokus mengarah pada kebijakan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- b) Meningkatkan mekanisme pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi berkolaborasi dengan Inspektorat Provinsi NTT.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional" sebesar 114,22%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung dengan realisasi *output* sebanyak 2 SHP atas Topik dan 1 laporan hasil pengawasan non prioritas/dukungan atau tercapai 100,00% dari target *output* sebanyak 2 SHP atas Topic dan 1 laporan hasil pengawasan non prioritas/dukungan. Anggaran kegiatan sebesar Rp108.587.000,00 dengan realisasi sebesar Rp108.583.450,00 atau 99,99% dari anggaran, sedangkan penggunaan SDM sebanyak 419 OH atau 96,99% dari target 432 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana sebesar 99,99% dan capaian OH sebesar 96,99% lebih rendah dari capaian *output*.

**c. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha**

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” diukur dengan menggunakan 4 IKK yaitu:

- 1) Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat;
- 2) Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat;
- 3) Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan;
- 4) Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa.

Ringkasan capaian kinerja sasaran kegiatan 3 disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6.**

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>							
3.1	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	8	8	8	100,00	●	
3.2	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	3	2	2	100,00	●	
3.3	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	62	90	102	113,33	●	
3.4	Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa	BUMDes	N / A	2	2	100,00	●	
Capaian Rata-Rata							103,33	

Tabel 3.5. menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 sebesar 103,33%.

Capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” didukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam Agenda Prioritas Pemerintah (APP) yaitu:

- 1) Satu topik APP Kesehatan dengan satu PKPT terkait Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan;
- 2) Satu topik APP Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan satu PKPT terkait Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air;
- 3) Satu topik APP Penguatan Infrastruktur untuk Produktivitas, Konektivitas dan Mobilitas dengan satu PKPT terkait Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan pada BUMN;
- 4) Satu topik APP Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dengan tiga PKPT terkait Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan, Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) dan kinerja keuangan, operasional BPD serta Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern BU Jasa Air;
- 5) Satu topik APP Stimulus dan Dukungan terhadap Korporasi dengan tiga PKPT terkait Pengawasan Penempatan Dana pada BPD, Pengawasan Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin) serta Pengawasan atas Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin baik reguler maupun tambahan);
- 6) Satu topik APP Peningkatan Produksi Bahan Pangan dengan satu PKPT terkait Pengawasan atas tata kelola subsidi pupuk;
- 7) Satu topik APP Tata Kelola Cadangan Pangan dengan satu PKPT terkait Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah;
- 8) Satu topik APP Peningkatan Pendapatan dengan tiga PKPT terkait Pengawasan Peran BUMDes terhadap Kebijakan Pengembangan

Kewirausahaan, Kemitraan, dan Keperantaraan dengan BUMD, Pengawasan Akses Permodalan bagi Masyarakat Miskin serta Pengawasan Peran BUMDes terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMDes.

Uraian kinerja atas 4 IKK pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” adalah sebagai berikut:

### 1) Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat”, merupakan BUMD yang mencapai kategori “**sehat**” berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dengan menilai 4 aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia (SDM). Tingkat kesehatan dikategorikan ke dalam PDAM sehat, PDAM kurang sehat dan PDAM sakit.



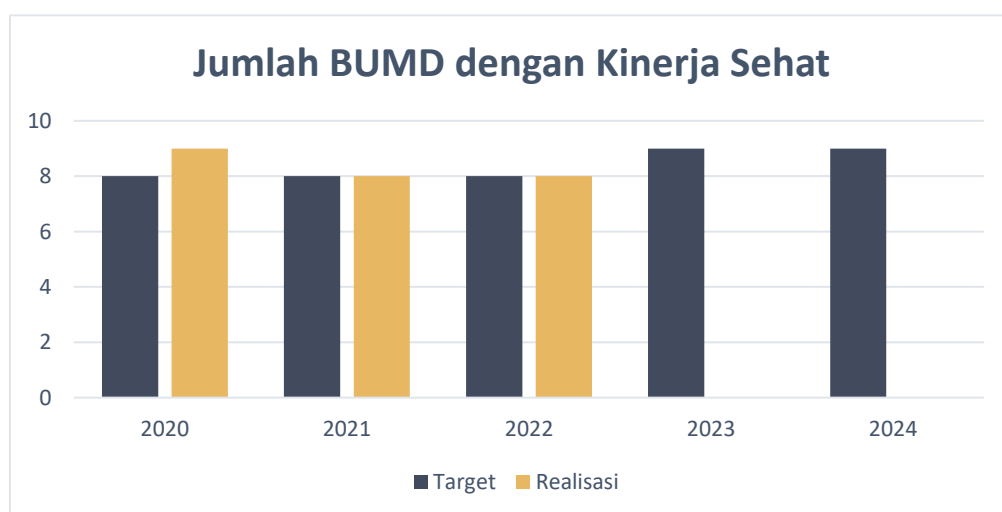
Realisasi jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat Tahun 2022 sebanyak 8 BUMD atau mencapai 100% dari target sebanyak 8 BUMD. Realisasi 8 BUMD dengan kinerja sehat diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara atas penilaian kinerja kesehatan PDAM dengan indikator

yang dipergunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. BUMD dengan kinerja sehat Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama BUMD	Prov/Kab/Kota	Kategori Kinerja
1	PDAM Tirta Bening Lontar	Kota Kupang	Sehat
2	Perumdam Matawai Amahu	Kabupaten Sumba Timur	Sehat
3	PDAM Kab. Lembata	Kabupaten Lembata	Sehat
4	Perumdam Tirta Cendana	Kabupaten Timor Tengah Utara	Sehat
5	Perumdam Wae Mbeliling	Kabupaten Manggarai Barat	Sehat
6	Perumdam Tirta Komodo	Kabupaten Manggarai	Sehat
7	Perumdam Ina Gelekat	Kabupaten Flores Timur	Sehat
8	PDAM Tirta Lontar	Kabupaten Kupang	Sehat

Rincian kategori kinerja BUMD dapat dilihat pada lampiran 6.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Grafik di atas menunjukkan IKK “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” tahun 2022 telah terealisasi 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. Dengan tercapainya target tahun 2022 sebanyak 8 BUMD sehat, Perwakilan BPKP NTT yakin target tahun 2024 sebanyak 9 BUMD akan dapat tercapai.

Dalam mendukung capaian kinerja “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah melakukan *Desk Evaluation* Data Awal Evaluasi Kinerja PDAM Provinsi NTT.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi SDM yang memadai.
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana seluruhnya.
- c) Proses transfer ilmu kepada BUMD melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan konsultasi lainnya yang berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
- d) Komunikasi dengan BUMD terjalin dengan baik, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMD terutama dalam hal manajemen dan keuangan disampaikan kepada Bidang Pengawasan Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi NTT dengan baik untuk diberikan saran dan rekomendasi.

Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

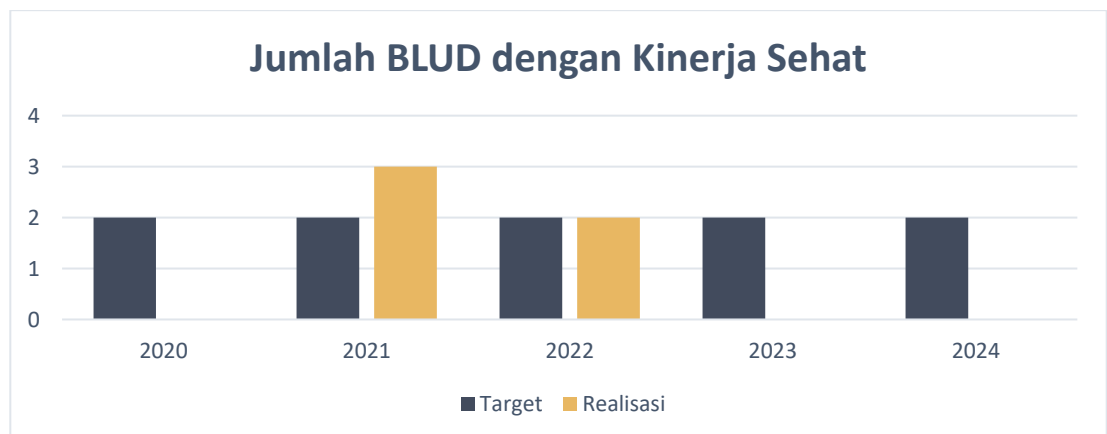
- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat terkait evaluasi kinerja pada BUMD
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan semua BUMD yang ada di Provinsi NTT;
- c) Peningkatan kapasitas layanan konsultasi oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara kepada BUMD melalui tatap muka maupun daring;
- d) Peningkatan kapasitas SDM BUMD terutama dalam pengelolaan keuangan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

## 2) Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” merupakan jumlah BLUD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPKP mencapai kategori “sehat” berdasarkan kriteria penilaian dalam Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja RSD BLUD yang diterbitkan oleh BPKP.

Realisasi Tahun 2022 sebanyak 2 BLUD dengan kategori sehat atau tercapai 100% dari target 2 BLUD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil evaluasi kinerja BLUD yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara pada RSUD Ende Kabupaten Ende dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Grafik di atas menunjukkan target 2 BLUD dengan kinerja sehat telah tercapai 100% dari hasil evaluasi atas 2 BLUD, sedangkan realisasi tahun 2021 sebanyak 3 BLUD dari 5 BLUD yang dievaluasi. Penugasan evaluasi kinerja BLUD yang ditetapkan dalam PKPT Tahun 2022 hanya atas 2 BLUD. Dengan tercapainya kinerja 100% pada tahun 2022 maka target tahun 2024 sebanyak 2 BLUD diyakini akan dapat tercapai 100% melalui peningkatan strategi pengawasan yang telah dirancang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi SDM yang memadai;
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana seluruhnya;
- c) Proses transfer ilmu kepada BLUD melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan konsultasi lainnya yang berjalan dengan baik;
- d) Komunikasi dengan BLUD terjalin dengan baik, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BLUD terutama dalam hal manajemen dan keuangan disampaikan kepada Bidang Pengawasan Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi NTT dengan baik untuk diberikan saran dan rekomendasi.



Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengusulkan peserta diklat terkait evaluasi kinerja BLUD.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan semua BLUD yang ada di Provinsi NTT;



- c) Peningkatan kapasitas SDM BLUD terutama dalam pengelolaan keuangan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Salah satunya terkait implementasi Aplikasi Forsa BLUD-Penatausahaan;
- d) Peningkatan kapasitas layanan konsultasi oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara kepada BLUD melalui tatap muka maupun daring.

### 3) Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan

IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan”



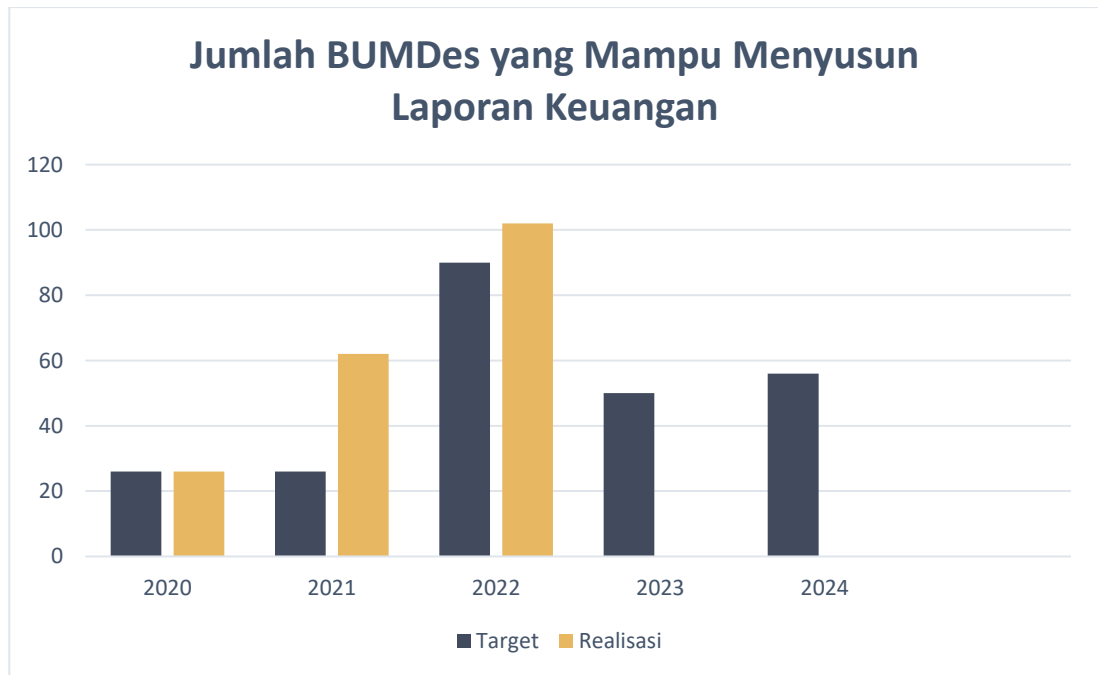
bermakna kemampuan BUMDesa untuk menyusun laporan keuangan dengan mengimplementasikan/memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BUMDes. SIA BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BUMDesa melalui aplikasi sederhana yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya agar laporan keuangan yang disusun lebih andal dan

akurat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam pengambilan keputusan bagi pengurus BUMDes maupun pemangku kepentingan lainnya

IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” diukur dengan jumlah BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan setelah adanya pendampingan oleh BPKP.

Realisasi “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” sebanyak 102 BUMDes atau mencapai 113,33% dari target 90 BUMDes.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun 2024 disajikan grafik berikut:



Grafik di atas menunjukkan Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan pada tahun 2022 sebanyak 102 BUMDes meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebanyak 62 BUMDes. Realisasi 102 BUMDes tersebut telah melampaui target tahun 2024 sebanyak 56 BUMDes sehingga dengan strategi yang telah dirancang target 2024 diyakini akan dapat dicapai.

Dalam mendukung capaian kinerja “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah melakukan Asistensi Implementasi Aplikasi SIA BUMDes pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Ende.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi SDM memadai;
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana seluruhnya;
- c) Proses transfer ilmu kepada BUMDes melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan konsultasi lainnya terkait tata kelola keuangan BUMDes yang berjalan dengan baik;

- d) Hubungan yang baik dengan BUMDes sehingga kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes terutama dalam hal manajemen dan keuangan tersampaikan kepada Bidang Pengawasan Akuntan Negara dengan baik untuk diberikan saran dan rekomendasi.

Strategi peningkatan tahun 2023, antara lain:

- a) Meningkatkan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke BUMDes melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;
- b) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengusulkan peserta diklat terkait tata kelola keuangan desa;
- c) Peningkatan kapasitas SDM BUMDes terutama dalam pengelolaan keuangan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
- d) Peningkatan kapasitas layanan konsultasi oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara melalui tatap muka maupun daring.

#### **4) Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi Pada Perekonomian Desa**

IKK “Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa” diukur dengan BUMDes yang mampu memberikan kontribusi pada perekonomian desa salah satunya BUMDes mampu berperan dalam Pengembangan Potensi Desa.

Realisasi Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 2 BUMDes atau mencapai 100% dari target 2 BUMDes.

IKK tersebut baru terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan target 2023 serta 2024 belum ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan maupun dengan target 2024. Namun demikian Perwakilan BPKP Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan kinerja serta merancang strategi untuk pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam mendukung capaian kinerja “Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa” Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah melakukan Evaluasi Peran BUMDesa dalam Pengembangan Potensi Desa di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Ende.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi SDM yang memadai;
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana seluruhnya;
- c) Proses transfer ilmu kepada BUMDes melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan konsultasi lainnya yang berjalan dengan baik;
- d) Hubungan yang baik dengan BUMDes sehingga kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes terutama dalam hal manajemen dan keuangan tersampaikan kepada Bidang Pengawasan Akuntan Negara dengan baik untuk diberikan saran dan rekomendasi.

Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Meningkatkan hubungan baik dengan melakukan pendekatan ke BUMDes melalui komunikasi yang persuasif dan efektif;
- b) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan diklat terkait manajemen dan penatausahaan keuangan BUMDes;
- c) Peningkatan kapasitas SDM BUMDes terutama dalam pengelolaan keuangan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
- d) Peningkatan kapasitas layanan konsultasi oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara melalui tatap muka maupun daring.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha” sebesar 103,33%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung dengan realisasi *output* sebanyak 14 SHP atas Topik atau tercapai 100,00% dari target *output* sebanyak 14 SHP atas Topik. Anggaran kegiatan sebesar Rp754.666.000,00 dengan realisasi sebesar Rp753.321.200,00 atau 99,82% dari anggaran sedangkan penggunaan SDM sebanyak 2.166 OH atau 97,17% dari target 2.229 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian dana sebesar 99,82% dan capaian OH sebesar 97,17%.

**d. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” diukur dengan menggunakan 4 IKK yaitu:

- 1) Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti;
- 2) Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
- 3) Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik;
- 4) Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area of Improvement* (Aoi) dari hasil pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK).



Ringkasan capaian kinerja sasaran kegiatan 4 disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 4**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>							
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti		Persen	100	100	100	100,00	●
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti		Persen	100	80	100	125,00	●
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Pemda	N/A	2	0	0	●
4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK		Pemda	N/A	1	2	200,00	●
Capaian Rata-Rata							106,25	

Tabel 3.7 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 sebesar 106,25%. Uraian kinerja atas 4 IKK pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” adalah sebagai berikut:

a) **Persentase Hasil Pengawasan Represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti**

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti” merupakan Pengawasan investigasi BPKP yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli (PKA), dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam IKK ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.

IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" diukur dengan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan represif. Target kinerja ini tahun 2022 sebesar 100% Realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti" Tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai 100% dari target. Realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dan target tahun 2024, sehingga target tahun 2024 diyakini dapat tercapai.

Kinerja tersebut diperoleh atas hasil 10 penugasan Audit PKKN, 1 penugasan Audit Investigatif, 1 penugasan Audit Tujuan Tertentu dan 18 Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) terdiri dari 9 PKA di hadapan Penyidik Kepolisian, 1 PKA di hadapan Penyidik kejaksaan dan 8 PKA pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) SDM telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penugasan;

- b) Melaksanakan simulasi sidang sebelum memberikan keterangan ahli dalam persidangan;
- c) Telah tersedia pedoman dalam melaksanakan penugasan, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI);
  - (2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan audit investigatif, PKKN, pemberian keterangan ahli bagi seluruh auditor BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Ekspose atas permintaan penugasan oleh penyidik dilakukan dengan lebih fokus dan teliti atas kasus yang terjadi dikaitkan dengan setiap unsur dugaan tindak pidana korupsi;
  - b) Melakukan koordinasi secara intensif kepada APH.
- b) **Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti**

IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" Beranjak dari identifikasi penyebab korupsi yang terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek individu, aspek sistem dan aspek budaya, BPKP telah menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi melalui berbagai instrumen pengawasan, dari pembinaan SPIP, GCG, dan pengawasan intern lainnya yang mengelola risiko operasional serta instrumen yang secara khusus berfokus pada risiko korupsi. Berbagai upaya tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga strategi: edukatif, preventif dan represif.

Strategi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Strategi ini



menjadikan pembelajaran sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi, di samping proses preventif dan represif. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Melalui pembelajaran informal yang terstruktur akan terjadi proses interaksi pemikiran dan pengetahuan, melahirkan individu yang mengerti dan memahami korupsi dan anti korupsi, selanjutnya termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi melalui sarana sistem pengaduan internal. Dengan berjalannya waktu, melalui proses interaksi peserta belajar di lingkungan organisasinya diharapkan terjadi proses pembiasaan perilaku anti korupsi yang mengarah pada pembentukan budaya organisasi anti korupsi.

Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan* (FCP) maupun *Fraud Risk Assessment* (FRA). Sistem diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam FCP dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang anti korupsi tersebut.

Kinerja efektivitas hasil pengawasan didefinisi sebagai persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan edukatif dan preventif, yang diukur dengan membandingkan jumlah K/L/P/BU yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan edukatif dan preventif dengan jumlah KLPBU sasaran pengawasan edukatif dan preventif.

IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" diukur dari jumlah penugasan pengawasan preventif yang rekomendasinya ditindaklanjuti instansi

pemerintah/badan usaha dibagi dengan jumlah penugasan pengawasan preventif.

Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 125,00% dari target tahun 2022 sebesar 80% yang diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Investigasi sebanyak 7 kegiatan yaitu; 5 penugasan FRA, 1 penugasan FCP, 1 penugasan MPAK, dan 2 penugasan *coaching clinic*, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nomor ST	Nama Penugasan
1	ST-93/PW24/5/2022	Penyusunan Profil Risiko Kecurangan terhadap Topik Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
2	PE.13.02/ST-676/PW24/5/2022	Penyusunan Profil Risiko Kecurangan terhadap Topik Program Penanganan Stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
3	PE.13.02/ST-676/PW24/5/2022	Sosialisasi dalam rangka Pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTT
4	PE.08.02/ST-697/PW24/5/2022	Penyusunan Profil Risiko Kecurangan terhadap topik Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional ( <i>Food Estate</i> ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
5	PE.08.02/ST-855/PW24/5/2022	Penyusunan Profil Risiko Kecurangan terhadap topik Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Kabupaten Manggarai Barat
6	PE.08.02/ST-937/PW24/5/2022	Penyusunan Profi Risiko Fraud Penyelenggaraan Infrastruktur SPAM pada Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Balai Prasarana Pemukiman Provinsi NTT
7	PE.07.02/ST-1025/PW24/5/2022	Bimbingan Teknis Konsultasi

		Pengendalian Kecurangan/ Fraud Control Plan (FCP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
8	PE.07/ST-489/PW24/5/2022	Penugasan Coaching Clinic Bidang Keinvestigasian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur
9	PE.07.02/ST-1041/PW24/5/2022	Coaching Clinic Bidang Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Realisasi kinerja “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti” tahun 2022 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2021 dan telah melampaui target kinerja tahun 2024 sebesar 90%. Dengan demikian target tahun 2024 diyakini akan dapat dicapai

Tercapainya target kinerja antara lain didukung oleh:

- a) Kompetensi SDM bidang Investigasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penugasan;
- b) Komitmen Pemda dalam hal pemberantasan korupsi dan ada regulasi yang mendukung, yaitu Peraturan Presiden 54 tahun 2018 yang mengharuskan setiap pemda untuk melakukan aksi pencegahan korupsi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Ekspose intern sebelum penugasan yang bersifat preventif dan edukatif untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan;
  - b) Koordinasi secara intensif dengan *stakeholders*.
- c) **Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik**  
 IKK “Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” menggambarkan Pemerintah daerah telah melaksanakan pengendalian korupsi secara efektif.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan komposit dari tiga pilar yang merepresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif GRC. Pilar pertama adalah kapabilitas yang merupakan interseksi antara kapasitas, power, sumber daya, dan kompetensi lembaga yang menjadi kekuatan dari dalam (*inside out*) yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif. Pilar ini bertumpu pada komitmen puncak yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan, struktur, metoda, dan dukungan sumber daya yang eksplisit untuk tujuan mengelola risiko korupsi. Asesmen risiko korupsi secara komprehensif dan pengembangan infrastruktur cegah & deteksi, seperti sistem antisuap dan WBS, misalnya, menandai keberadaan kapabilitas ini.

Pilar kedua adalah *implementedness* dari strategi cegah dan deteksi, yakni seberapa konkret strategi pencegahan diterapkan. Pilar ini menunjukkan seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi tumbuh sebagai buah atas pengembangan kapabilitas di pilar satu. Pilar ini ditandai dengan tingkat kepedulian, transparansi, dan partisipasi pegawai/ stakeholder dalam WBS, serta keberadaan kepemimpinan etis dan iklim etis yang dirasakan pegawai dan *stakeholder*.

Pilar ketiga adalah dimensi respon, yaitu melihat seberapa jauh konsistensi pengelolaan risiko korupsi diwujudkan. Sistem investigasi, tindakan korektif, termasuk sanksi kepada pelaku, serta frekuensi dan signifikansi peristiwa korupsi yang terjadi dan/atau persepsi korupsi menjadi penanda efektivitas pada pilar ketiga.

Ketiga strategi dilakukan BPKP dalam rangka membantu instansi mengelola risiko korupsi. Strategi represif melalui beberapa bentuk audit dilakukan sebagai bagian dari konsistensi penegakan aturan

yang diharapkan memberikan efek *deterrence* serta munculnya tindakan korektif. Strategi preventif dan edukatif diwujudkan dalam berbagai aktivitas fasilitasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan, mulai dari a.l. sosialisasi antikorupsi, pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), *Fraud Control Plan* (FCP), FRA, dll.

IKK “Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan rumus skor IEPK yang merupakan komposit skor atas tiga pilar yaitu kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

IEPK berskala 1 s.d. 5, dengan skor 1 bermakna kondisi terburuk, skor 2 hingga 4 menunjukkan kecenderungan pengelolaan risiko korupsi yang semakin baik dan substansial dan skor 5 diberikan untuk kondisi yang paling ideal (substansial – optimal).

Pelaksanaan Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2022 dilakukan melalui implementasi SPIP terintegrasi dengan konsep *result based* dengan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Target kinerja jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik pada tahun 2022 adalah 2 Pemda. Hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi NTT tahun 2022 atas 3 pemerintah daerah menunjukkan skor IEPK pada Provinsi NTT sebesar 2,680, Kabupaten Belu 2,990 dan Kabupaten Nagekeo 2,403. Dengan skor tersebut Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan terus melakukan pendampingan dan mendorong Pemda agar dapat mencapai skor 3 pada tahun berikutnya.

Untuk mendukung capaian kinerja, selama tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Bimtek peningkatan IEPK di Provinsi NTT dan Kabupaten

Nagekeo serta *Fraud Control Plan* (FCP) di Kabupaten Belu. Kegiatan Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Hasil Penilaian Mandiri IEPK oleh 3 (tiga) Pemda tersebut di atas serta hasil evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT, sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Skor IEPK	
		Pemda	Hasil Evaluasi
1.	Provinsi NTT	3,610	2,680
2.	Kabupaten Belu	3,630	2,990
3.	Kabupaten Nagekeo	3,000	2,403

Berdasarkan hasil evaluasi, perubahan Nilai IEPK hasil evaluasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Belum terdapat kebijakan eksplisit atas pengendalian risiko korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan dan penetapan struktur pengelola risiko korupsi;
- b) Pemda maupun perangkat daerah belum menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengusulkan peserta diklat terkait penilaian IEPK dalam SPIP terintegrasi ;
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi yang aktif dengan Pemda di Wilayah Provinsi NTT.

d) **Jumlah Pemda menindaklanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK)**

IKK "Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran EPK" diukur dari jumlah Pemda yang menindaklanjuti hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) IEPK yang dilaksanakan oleh BPKP. Realisasi Pemda yang memanfaatkan/ menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi) dari hasil Bimtek IEPK yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2022 sebanyak 2 Pemda atau mencapai 200% dari target tahun 2022 sebanyak 1 pemda. Kinerja tersebut diperoleh dari hasil penugasan Bimtek Peningkatan IEPK pada Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo.

IKK ini merupakan IKK yang baru ditetapkan pada tahun 2022 dan belum dilakukan penetapan atas target tahun 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan target 2024.

Tercapainya target kinerja antara lain didukung oleh:

- a) Kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) SDM telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penugasan;
- b) Komitmen pemda dalam menerapkan pengendalian korupsi.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi yang aktif dengan Pemda di Wilayah Provinsi NTT dalam pengendalian korupsi.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" sebesar 106,25%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung dengan realisasi *output* sebanyak 2 SHP atas Topik atau tercapai 100,00% dari target *output* sebanyak 2 SHP atas Topik. Anggaran kegiatan sebesar

Rp237.914.106,00 dengan realisasi sebesar Rp229.744.383,00 atau 96,57% dari anggaran sedangkan penggunaan SDM sebanyak 994 OH atau 99,60% dari target 998 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian dana sebesar 96,57% dan capaian OH sebesar 99,60%.

**e. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU ” diukur dengan menggunakan 8 IKK yaitu:

- 1) Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3;
- 2) Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3;
- 3) Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3;
- 4) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3;
- 5) Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3;
- 6) Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel;
- 7) Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan asset desa secara memadai;
- 8) Jumlah BLU/D dengan MRI  $\geq$  Level 3.

Ringkasan capaian kinerja sasaran kegiatan 5 disajikan pada Tabel 3.8.



Tabel 3.8.

## Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 5

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU</b>							
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Prov	0	1	1	100	●	
5.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	3	4	4	100	●	
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Prov	0	1	0	0	●	
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	2	3	2	66,67	●	
5.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	0	1	0	0	●	
5.6	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	0	20	512	2562	●	
5.7	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan asset desa secara memadai	Desa	-	20	82	410%	●	
5.8	Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	-	2	2	100	●	
	Capaian Rata-Rata						422,71	

Tabel 3.7. menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 8 sebesar 422,71%. Uraian kinerja atas 8 IKK pada sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU" adalah sebagai berikut:

### 1) Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3

IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3" diukur dari tingkat kapabilitas APIP level 3 yang diperoleh oleh Inspektorat Provinsi dari hasil evaluasi oleh BPKP dalam hal ini Level 3

Kapabilitas APIP yang ditetapkan dari hasil evaluasi oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD).

Realisasi tahun 2022 mencapai 100% yaitu Inspektorat Provinsi NTT memperoleh skor 3,000 atau berada pada tingkat Kapabilitas APIP Level 3 sesuai penetapan dalam surat Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD nomor PE.09.03/SP-1513/D3/04/2022 tanggal 28 Desember 2022 terkait Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor: PE.09.03/LHP-559/PW24/6/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Provinsi NTT.

Dari hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT, hasil evaluasi jenjang 1 oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT dan hasil evaluasi jenjang 2 oleh Deputi PPKD ditetapkan Inspektorat Provinsi NTT mencapai level 3 pada 6 elemen kapabilitas APIP sebagaimana pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9.**  
**Skor dan Level Kapabilitas APIP Per Elemen**  
**Inspektorat Provinsi NTT Tahun 2022**

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Provinsi NTT		Hasil Evaluasi Jenjang 1 (Perwakilan BPKP NTT)		Hasil Evaluasi Jenjang 2 (Deputi PPKD)		
<b>A. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</b>								
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	3	0,540	3	0,540	
2.	Praktik Profesional	3	0,540	3	0,540	3	0,540	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180	3	0,180	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180	3	0,180	
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360	3	0,360	3	0,360	
<b>B. Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</b>								
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	3	1,200	3	1,200	
<b>Level/Skor Kapabilitas APIP</b>		<b>3</b>	<b>3,000</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>	

Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi NTT disampaikan *Area of Improvement* dari hasil evaluasi Kapabilitas APIP antara lain:

- a) Elemen SDM terkait Peningkatan kompetensi SDM APIP terkait manajemen risiko
- b) Elemen Praktik Profesional terkait pemutakhiran Register Risiko dan evaluasi relevansinya dengan tujuan program, Identifikasi risiko dilakukan secara hati-hati dalam kaitan penentuan jenis pengawasan yang tepat, meningkatkan implementasi MR Pemda, melalui penyusunan Register Risiko pada level OPD dan level program kegiatan strategis Pemerintah Daerah.
- c) Elemen Peran dan Layanan,
  - (1) Menggunakan *register risiko* sebagai acuan dalam menyusun TAO audit ketaatan dan TAO audit kinerja
  - (2) Rekomendasi hasil audit ketaatan hendaknya mempertimbangkan level risiko agar tidak terjadi temuan yang berulang dan meningkatkan perbaikan *Governance Risk Control (GRC)*.
  - (3) Perbaikan kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program serta lebih mendalami penyebab hakiki tidak tercapainya target pada setiap IKK melalui *Root Cause Analysis (RCA)*.
  - (4) Mendorong pelaksanaan audit kinerja pada program strategis lintas sektoral sehingga dapat diukur keberhasilannya secara komprehensif.
  - (5) Terkait Asurans atas GRC, Inspektorat perlu mendorong manajemen melakukan penilaian mandiri atas

penyelenggaraan SPIP dan melakukan penjaminan kualitasnya, mendampingi Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian risiko dan memastikan rekomendasi atas hasil asurans GRC berfokus pada perbaikan 3E, GRC dan *Early Warning*.

- (6) Inspektorat agar meningkatkan pemberian jasa konsultasi untuk mendorong efektivitas implementasi MR di Provinsi NTT.
- (7) Inspektorat agar menegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan atas saran yang diberikan tetap berada pada manajemen, APIP bertanggung jawab sebatas atas saran yang diberikan.

Realisasi Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT di tahun 2022 meningkat 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dimana kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 masih berada pada level 2. Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi NTT diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar target Level 3 pada Tahun 2024 tetap dapat dicapai.

Dalam mendukung capaian kinerja "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3" Perwakilan BPKP NTT telah melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP sejak tahun 2021 dan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022 pada Inspektorat Provinsi NTT.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Komitmen Inspektur Provinsi dalam peningkatan kapabilitas APIP salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 untuk melakukan penilaian

mandiri dan memantau perkembangan tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

- b) Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Inspektorat Provinsi NTT dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan parameter setiap elemen pada saat penilaian mandiri melalui aplikasi PK APIP.

Upaya yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam pencapaian kinerja antara lain Melaksanakan *workshop* dan sosialisasi bagi APIP se wilayah NTT secara daring terkait Peraturan BPKP No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP, *workshop* Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), *workshop* Audit kinerja berbasis risiko, dan *workshop* Aplikasi penilaian Kapabilitas APIP.

Strategi peningkatan kinerja yang dilakukan:

- a) Memantau pelaksanaan *Area of Improvement* (Aoi) hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi tahun 2022.
- b) Menjadwalkan waktu pelaksanaan *workshop* penilaian kapabilitas APIP Tahun 2023 fokus per elemen secara *online* untuk mendorong dan mengarahkan Inspektorat Provinsi melaksanakan kembali penilaian mandiri Tahun 2023.
- c) Membangun sinergi dengan APIP melalui *Liaison Officer* (LO) maupun *WhatsApp Grup* (WAG) agar APIP termotivasi untuk aktif berkonsultasi dan berkoordinasi dalam peningkatan level kapabilitas APIP

## 2) Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3

IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3" diukur dari tingkat kapabilitas APIP level 3 yang diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dari hasil evaluasi oleh BPKP dalam hal ini Level 3. Kapabilitas APIP yang ditetapkan dari hasil evaluasi oleh Deputy Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk APIP yang level 3 di Tahun 2022 dan hasil evaluasi Perwakilan BPKP untuk APIP yang telah Level 3 sebelum tahun 2021.



Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 4 APIP Kabupaten memperoleh Kapabilitas APIP Level 3 atau tercapai 100% dari target 4 APIP Kabupaten. APIP Kabupaten yang memperoleh Kapabilitas APIP Level 3 dengan skor 3,00 adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Belu, Inspektorat Kabupaten Manggarai dan Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Inspektorat kabupaten Sumba Timur merupakan Inspektorat Kabupaten yang memperoleh Level 3 pada Tahun 2022 sesuai penetapan dalam

surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) nomor PE.09.03/SP-1502D3/04/2022 tanggal 28 Desember 2022 terkait Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor: PE.09.03/LHP-560/PW24/6/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Realisasi 4 APIP Kabupaten dengan Kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2022 meningkat 1 APIP dibandingkan realisasi tahun 2021 sebanyak 3 APIP Kabupaten dengan Kapabilitas APIP Level 3 atau capaian tahun 2022 sebesar 100% meningkat 25% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 75%. Realisasi Tahun 2022 mencapai 33,33% dari target tahun 2024 sebanyak 12 APIP Kabupaten/Kota Level 3. Dengan adanya revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 maka target tahun 2023 dan 2024 akan dievaluasi kembali menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur APIP dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi NTT pada tahun 2022.

Dalam mendukung capaian kinerja “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3” Perwakilan BPKP NTT telah melaksanakan kegiatan penting antara lain:

- a) Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP kepada Inspektorat Daerah Se-Wilayah Provinsi NTT secara daring.
- b) *Workshop* Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP kepada Inspektorat Daerah se-Provinsi NTT secara daring
- c) *Workshop* Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan *Workshop* Audit Kinerja Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Deputi PPKD Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2020 secara daring

- d) Bimbingan Teknis Penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Nagekeo,
- e) Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Se-Wilayah Provinsi NTT secara *on-desk* melalui aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP.
- f) Bimbingan Teknis Penerapan JFA dan Aplikasi Sibijak pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain :

- a) Komitmen Inspektur dalam peningkatan kapabilitas APIP salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3, penerbitan surat tugas dan pelaksanaan penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada masing-masing Inspektorat serta penyampaian surat permintaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat tahun 2022 kepada Perwakilan BPKP Provinsi NTT.
- b) Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Inspektorat Kabupaten/Kota dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan parameter setiap elemen pada saat penilaian mandiri melalui aplikasi PK APIP.

Target kinerja tahun 2022 telah tercapai 100%, namun kondisi level kapabilitas APIP diwilayah Provinsi NTT secara umum masih perlu mendapat perhatian. Hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT menunjukkan bahwa dari 22 APIP Kabupaten/Kota yang ada, 4 APIP berada pada level 3, 8 APIP berada pada Level 2 dan 10 APIP berada pada Level 1. Rincian Level dan skor Kapabilitas APIP selengkapnya disajikan pada Lampiran 9.



Secara umum dari 18 topik penilaian yang ada, topik yang paling banyak tidak mencapai Level 3 adalah topik Perencanaan Pengawasan, topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas topik audit ketaatan, audit kinerja dan topik *assurance* atas *Governance, Risk, and Control (GRC)* organisasi.

Upaya yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam pencapaian kinerja antara lain dengan meningkatkan pemahaman APIP terkait pentingnya pemenuhan parameter penilaian kapabilitas APIP dalam meningkatkan kualitas dan memperkuat peran dan layanan APIP dalam mengawal



peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah. Terkait hal tersebut Perwakilan BPKP Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan *workshop* secara daring yang diikuti oleh APIP di wilayah Provinsi NTT antara lain:

- a) *Workshop* dan sosialisasi Peraturan BPKP No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP, Peraturan Deputi PPKD Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Peraturan Deputi PPKD Nomor 9 Tahun 2020 tentang Audit kinerja berbasis risiko, dan *workshop* Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh Bidang Pengawasan P3APIP.
- b) Sosialisasi Penyusunan *Risk Register* (RR) dan Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah

Daerah di Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

- c) Menyampaikan *Area of Improvement* hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP antara lain :
- (1) Perencanaan SDM, Jumlah SDM pada APIP di wilayah Provinsi NTT, rata-rata masih di bawah kebutuhan minimal yang diharapkan, dan sebagian APIP belum menyusun analisis dan rencana kebutuhan SDM.
  - (2) Pengembangan SDM APIP, Kurangnya SDM APIP profesional dalam bidang pengelolaan risiko khususnya risiko *fraud*.
  - (3) Perencanaan Pengawasan, Risk register belum disusun atau dimutakhirkan dan belum dievaluasi relevansinya dengan tujuan. Penyusunan PKPT belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi RR.
  - (4) Komponen Delivery/Peran dan Layanan APIP.
    - (a) Audit Ketaatan belum mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi, masih terbatas kepada ketaatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah secara umum
    - (b) Audit Kinerja belum mencakup lingkup isu strategis atau program yang memiliki prioritas dan risiko tinggi, tetapi masih terbatas kepada pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah ataupun terbatas pada suatu kinerja kegiatan bukan kinerja program strategis secara utuh.

- (c) Pelaksanaan *Assurance* atas *Governance, Risk and Control* (GRC) Organisasi belum menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis, struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko, pencapaian tujuan organisasi
  - (d) Jasa Konsultansi masih terbatas pada kehadiran pengguna layanan ke kantor Inspektorat, belum secara proaktif mendampingi pengguna layanan, belum didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala di samping itu jasa konsultansi yang diberikan juga masih bersifat operasional OPD.
- d) Menyampaikan rekomendasi atas *Area of Improvement* (Aoi) kepada Bupati/Walikota antara lain:
- (1) Segera mengangkat inspektur definitif bagi APIP yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas Inspektur
  - (2) Meningkatkan anggaran inspektorat minimal sesuai dengan batas minimal anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait tentang batas minimal anggaran pengawasan
  - (3) Meningkatkan kebutuhan jumlah SDM Inspektorat sesuai berdasarkan hasil analisis jabatan yang diusulkan oleh inspektorat
  - (4) Memerintahkan Inspektur untuk:
    - (a) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan termasuk sertifikasi dalam berbagai bidang pengawasan;
    - (b) Menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM

- (c) Menyusun dan menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko, serta memfokuskan peran dan layanan kepada assurance dan consulting terhadap penilaian kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis, struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko, pencapaian tujuan organisasi
- (d) Meningkatkan kapabilitas APIP menjadi minimal Level 3 (*delivered*) agar APIP dapat melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional serta mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.
- (e) Segera menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan standar operasi dan prosedur yang dibutuhkan serta mendokumentasikan hasil pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pemantauan tindak lanjut untuk menjaga kualitas pengawasan.

Strategi peningkatan kinerja yang dilakukan :

- a) Memantau pelaksanaan *Area of Improvement* (Aoi) hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Tahun 2022.
- b) Menjadwalkan waktu pelaksanaan *workshop* penilaian kapabilitas APIP Tahun 2023 fokus per elemen secara *online* untuk mendorong dan mengarahkan APIP melaksanakan kembali penilaian mandiri tahun 2023
- c) Membangun sinergi dengan APIP melalui *Liaison Officer* (LO) maupun *WhatsApp Group* (WAG) agar APIP termotivasi untuk

aktif berkonsultasi dan berkoordinasi dalam peningkatan level kapabilitas APIP

- d) Bidang P3APIP berkoordinasi dengan bidang Pengawasan APD dan Investigasi dalam penetapan APIP target level 3 dikaitkan dengan hasil penilaian SPIP terintegrasi dan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

### **3) Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3**

IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” merupakan jumlah Provinsi dengan level Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui Penilaian Mandiri (PM) oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Daerah Provinsi, dan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP serta Penjaminan Kualitas oleh Deputi PPKD.

Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu:

- a) Tahap Penetapan Tujuan;
- b) Tahap Struktur dan Proses;
- c) Tahap Pencapaian Tujuan.

IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3” diukur dengan tercapainya tingkat maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 pada Pemerintah Daerah Provinsi dari hasil penjaminan kualitas oleh Deputi PPKD. Target kinerja tahun 2022 adalah 1 Pemda Provinsi mencapai maturitas SPIP  $\geq$  Level 3.

Pada Pemerintah Provinsi NTT hasil PM dan PK memperoleh skor SPIP 4,140 namun hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi NTT menetapkan maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi NTT tahun 2022 berada pada Level 2 dengan skor 2,929 sesuai laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor PE.09.03/LPP-598/PW24/3/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.

Laporan hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Pemda Provinsi NTT baru diserahkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi NTT pada tanggal 19 Desember 2022, sehingga evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT baru dapat diselesaikan pada akhir Desember 2022.

Realisasi kinerja tahun 2022 sama dengan tahun 2021 namun skor maturitas SPIP tahun 2022 sebesar 2,929 meningkat dibanding skor tahun 2021 sebesar 1,7080. Dengan hasil skor tahun 2022 sebesar 2,929, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan terus melakukan pendampingan dan mendorong Pemda Provinsi agar dapat mencapai Level 3 pada tahun 2023.

Belum tercapainya target kinerja antara lain disebabkan:

- a) Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mencapai SPIP Level 3;
- b) Kesenjangan pemahaman asesor di setiap perangkat daerah dalam memahami Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- c) Kurangnya pemahaman Pemda Provinsi NTT dalam merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang

berorientasi *outcome*. Sasaran strategis dan indikator yang ada masih berorientasi *output*.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja antara lain:

- a) Bimbingan teknis penyusunan PM dan PK Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi NTT;
- b) Monitoring dan komunikasi secara berkala atas progres penyusunan PM dan PK Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi NTT;
- c) Ekspose panel dengan Kedeputian Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah atas progres hasil PM dan PK Pemerintah Provinsi NTT.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Secara bertahap dan berkelanjutan membekali para pegawai dengan pendidikan dan pelatihan keahlian/substantif terkait Maturitas SPIP Terintegrasi;
- b) Meningkatkan Koordinasi dan sinergi yang aktif dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Inspektorat Provinsi NTT.

#### **4) Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3**

IKK "Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3" merupakan Jumlah SPIP Kab/Kota dengan level Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui Penilaian Mandiri (PM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP serta Penjaminan Kualitas oleh Deputi PPKD.

Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu:

- a) Tahap Penetapan Tujuan;
- b) Tahap Struktur dan Proses;
- c) Tahap Pencapaian Tujuan.

IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3" diukur dengan tercapainya tingkat maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari hasil penjaminan kualitas oleh Deputi PPKD. Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak tiga Pemda.

Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 2 Kabupaten atau tercapai 66,67% dari target 3 Kabupaten/Kota yang diperoleh atas hasil pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Pemda yang telah memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka.

Tahun 2022 terdapat 2 kabupaten yang melakukan penilaian mandiri dengan hasil PM dan PK Level 3 yaitu; Kabupaten Manggarai Barat memperoleh skor SPIP 3,963 dan Kabupaten Manggarai memperoleh skor SPIP 3,893. Namun setelah dilakukan evaluasi kedua kabupaten tersebut, Kabupaten Manggarai Barat memperoleh skor SPIP 2,698 dan Kabupaten Manggarai memperoleh skor SPIP 2,959.



Realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu 2 Pemda dengan tingkat Maturitas SPIP Level 3. Target tahun 2024 sebanyak 7 Kabupaten/Kota Maturitas SPIP Level 3. Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan terus mendorong Pemda di wilayah provinsi NTT untuk meningkatkan Maturitas SPIP Level 3 pada tahun-tahun berikutnya. Tingkat Maturitas SPIP pada 22 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT sebagaimana disajikan pada lampiran 10.

Kendala tercapainya target kinerja antara lain disebabkan:

- a) Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai SPIP Level 3;
- b) Kesenjangan pemahaman asesor di setiap perangkat daerah dalam memahami Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- c) Kurangnya pemahaman Pemda Kabupaten/Kota dalam merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*. Sasaran strategis dan indikator yang ada masih berorientasi *output*.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja antara lain:

- a) Bimbingan teknis penyusunan PM dan PK Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Evaluasi atas hasil PM dan PK Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan skor SPIP  $\geq$  Level 3;
- c) Penilaian Cepat atas hasil PM dan PK pada 20 Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Penyelenggaraan *Workshop* Penyusunan Risk Register OPD pada 19 Pemda secara daring.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Secara bertahap dan berkelanjutan membekali para pegawai dengan pendidikan dan pelatihan keahlian/substantif terkait Maturitas SPIP Terintegrasi;
- b) Meningkatkan Koordinasi dan sinergi yang aktif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

#### **5) Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3**

IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3" diukur dari Jumlah Pemda yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI  $\geq$  Level 3 di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT, yang diperoleh dari hasil pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Penilaian Manajemen Risiko dilakukan melalui implementasi SPIP terintegrasi dengan konsep *result based* dengan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Target kinerja pada Tahun 2022 sebanyak satu Pemerintah Daerah. Hasil PM dan PK Kabupaten Manggarai Barat memperoleh skor MRI 3,6894 dan Kabupaten Manggarai memperoleh skor 3,940. Namun setelah dilakukan evaluasi kedua kabupaten tersebut, Kabupaten Manggarai Barat memperoleh skor MRI 2,584 dan Kabupaten Manggarai memperoleh skor MRI 2,310. Kondisi MRI Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi NTT tahun 2022 sebanyak 10 Kabupaten/Kota MRI berada pada Level 2 dan sebanyak 12 Kabupaten MRI Level 1.

Realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana MRI pada 22 Kabupaten/Kota masih berada pada Level 1 dan 2. Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan terus mendorong Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi NTT untuk meningkatkan MRI Level 3 pada Tahun-tahun berikutnya.

Kendala pencapaian target kinerja antara lain:

- a) Pemerintah daerah belum memiliki komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko;
- b) Kesenjangan pemahaman auditor Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam memahami Manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- c) Kesenjangan pemahaman SDM perangkat daerah didalam memahami dan mengimplementasikan Manajemen Risiko sepanjang siklus manajemen daerah pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- d) Belum adanya bimbingan teknis terkait dengan penilaian risiko.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Mendorong Kepala Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait MR;
- b) *Upskilling* SDM Perwakilan BPKP Provinsi NTT dan SDM Pemerintah Daerah melalui Diklat terkait substansi tata kelola dan transfer of knowledge secara berkelanjutan terutama terkait MRI;
- c) Meningkatkan koordinasi dan sinergi yang aktif dengan Inspektorat Daerah;
- d) Melakukan bimbingan teknis kepada perangkat daerah tentang MRI.

## 6) Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

IKK “Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” diukur dengan membandingkan jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban dengan total jumlah desa.

Realisasi jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2022 sebanyak 521 Desa atau mencapai 2.605% dari target tahun 2022 sebanyak 20 Desa. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil pemantauan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap implementasi penyusunan laporan keuangan Desa melalui aplikasi Siskeudes di wilayah Provinsi NTT.

IKK ini merupakan IKK yang baru ditetapkan pada tahun 2022 target 2024 atas IKK ini belum ditetapkan sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan target 2024.

Faktor pendukung tercapainya kinerja yang relatif tinggi/melampaui target antara lain:

- a) Aparatur desa sudah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b) Peran Pemerintah Daerah dari tingkat Kecamatan sampai dengan perangkat daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong pengimplementasian Aplikasi Siskeudes;

- c) Peran BPKP Perwakilan Provinsi NTT yang secara terus-menerus dalam monitoring dana desa mengingatkan pentingnya penggunaan Aplikasi Siskeudes dan adanya bimbingan teknis kepada Administrator Siskeudes.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan:

- a) Melakukan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Siskeudes pada pemerintah daerah untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b) Melakukan monitoring pengimplementasian Aplikasi Siskeudes mulai dari tahap penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa secara berkala;
- c) Menyampaikan atensi kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemerintah daerah.

#### **7) Jumlah Desa yang Menerapkan Aset Desa secara Memadai**

IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai” mengukur sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Secara Memadai” diukur dengan sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. Rumus pengukurannya adalah mengidentifikasi jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai Tahun 2022 sebanyak 82 desa di Provinsi NTT atau tercapai sebesar 410% dari target tahun 2022 sebanyak 20 Desa.

Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 82 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan diperoleh atas hasil monitoring yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Realisasi 82 Desa pada Tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 dimana Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebanyak 5 Desa. Target kinerja Tahun 2022 telah mengalami revisi sementara target tahun 2024 belum disesuaikan sehingga tidak dilakukan perbandingan kinerja dengan target Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain Pemahaman Perangkat Desa dan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait pengelolaan aset desa sudah cukup memadai

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja melalui Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa yang dilakukan pada Triwulan I dan IV Tahun 2022 serta koordinasi dengan APIP Daerah terkait monitoring pengelolaan aset desa.

Pemahaman terkait pengelolaan aset desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum masih memerlukan perhatian sehingga untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan melakukan:

- a) Melakukan bimbingan teknis terkait tata kelola aset desa kepada perangkat desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b) Melakukan monitoring pengelolaan aset desa secara berkala;

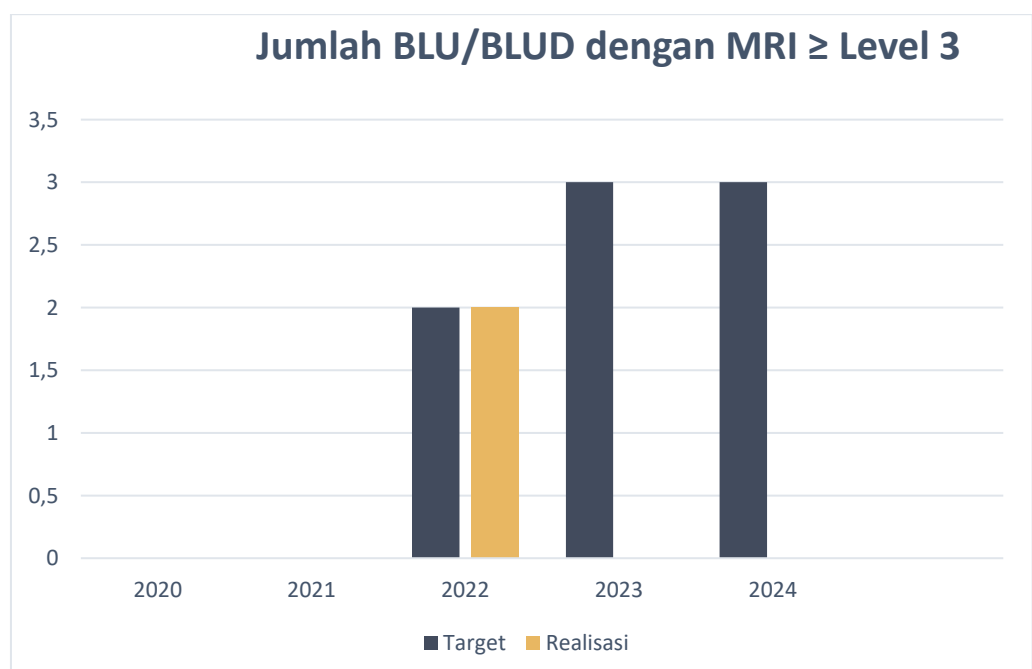
c) Menyampaikan atensi kewajiban penyusunan laporan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemerintah daerah.

### 8) Jumlah BLU/D Dengan MRI $\geq$ Level 3

IKK "Jumlah BLU/BLUD dengan MRI  $\geq$  Level 3" diukur dengan BLU/BLUD dengan MRI  $\geq$  Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

Realisasi tahun 2022 sebanyak 2 BLUD mencapai MRI Level 3 atau tercapai 100% dari target 2 BLUD. Hasil ini dicapai melalui Evaluasi Tingkat Maturitas Manajemen Risiko pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang dan pengisian kuesioner *baseline* manajemen risiko pada RS Bhayangkara yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target 2024 disajikan pada grafik berikut:



Grafik tersebut menunjukkan Jumlah BLUD dengan MRI  $\geq$  Level 3 telah tercapai sebesar 100%. IKK ini baru ditargetkan pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Dengan pencapaian tahun 2022 dan strategi peningkatan kinerja yang telah dirancang, target tahun 2024 sebanyak 3 BLUD mencapai level 3 diyakini akan dapat dicapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a) Kompetensi SDM yang memadai;
- b) Manajemen biaya dan waktu yang baik sehingga rencana penugasan dapat terlaksana seluruhnya;
- c) Proses transfer ilmu kepada BLU/BLUD melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan konsultasi lainnya yang berjalan dengan baik;
- d) Hubungan yang baik dengan BLU/BLUD sehingga kendala-kendala yang dialami oleh BLU/BLUD terutama dalam hal penerapan manajemen risiko tersampaikan kepada Bidang Pengawasan Akuntan Negara dengan baik untuk diberikan saran dan rekomendasi.

Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan diklat terutama yang terkait dengan MRI BLU/BLUD;
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan semua BLU/BLUD yang ada di Provinsi NTT;
- c) Peningkatan kapasitas SDM BLU/BLUD terutama dalam penerapan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
- d) Peningkatan kapasitas layanan konsultasi oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara melalui tatap muka maupun daring.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” sebesar



422,71%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung dengan realisasi *output* sebanyak 25 SHP atas Topik atau tercapai 100,00% dari target *output* sebanyak 25 SHP atas Topik. Anggaran kegiatan sebesar Rp1.583.547.750,00 dengan realisasi sebesar Rp1.521.200.183,00 atau 96,06% dari anggaran sedangkan penggunaan SDM sebanyak 7.482 OH atau 96,74% dari target 7.734 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian dana sebesar 96,06% dan capaian OH sebesar 96,74%.

**f. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja**

Kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja” Unit Kerja pada Bagian Umum diukur dengan tujuh IKK yaitu :

- 1) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
- 2) Nilai SAKIP Unit Kerja
- 3) Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)
- 4) Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)
- 5) Indeks Kualitas layanan Eksternal Unit Kerja
- 6) Skor IKPA Unit Kerja
- 7) Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Ringkasan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10.**  
**Ringkasan Capaian Sasaran Kegiatan 6**

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
6	<b>Meningkatnya Kualitas Kualitas Tata Kelola Unit Kerja</b>							
	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85,52	75	84,34	112,45	●

No.	SASARAN KEGIATAN		SATUAN	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Keterangan
	IKK							
1	2		3	4	5	6	7=6/5	8
	6.2.	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	87,21	82	90,50	110,37	●
	6.3.	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	94,12	70	94,87	135,53	●
	6.4.	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100	100	●
	6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	92,55	75	83,66	115,55	●
	6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	87	95	98,35	103,53	●
	6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	84,64	80	96,52	121	●
	<b>Rata-Rata Capaian SK</b>						<b>113,44</b>	

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu; ● = belum mencapai target

Uraian kinerja atas 7 IKK sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja adalah sebagai berikut:

### 1) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKK “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” menjadi upaya strategis yang dilakukan oleh unit kerja dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pencegahan korupsi. IKK ini dinilai dengan Skor Zona Integritas, sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021.

Target IKK ini pada tahun 2022 adalah 75,00. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT (NTT) telah melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun 2022 dan sudah dinilai oleh tim evaluator dari Inspektorat BPKP dengan hasil 84,34 atau mencapai 112,45% dari target 2022. Hasil penilaian oleh tim evaluator Inspektorat BPKP sebagai berikut:

No.	Uraian	Bobot	Nilai	%
<b>I</b>	<b>Pengungkit</b>			
<b>A</b>	<b>Pemenuhan</b>			
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,47	86,72
2	Penataan Tata Laksana	3,50	2,07	59,10
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,96	79,13
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,84	96,88
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,43	85,76
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,36	67,28
	<b>Sub Jumlah A</b>	<b>30,00</b>	<b>24,13</b>	<b>80,45</b>
<b>B</b>	<b>Reform</b>			
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,00	75,08
2	Penataan Tata Laksana	3,50	2,33	66,67
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	5,00	100,00
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,71	74,10
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,50	100,00
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	<b>Sub Jumlah B</b>	<b>30,00</b>	<b>26,54</b>	<b>88,47</b>
	<b>Total Sub Jumlah I</b>	<b>60,00</b>	<b>50,68</b>	<b>84,46</b>
<b>II</b>	<b>Hasil</b>			
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	17,96	79,83
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,71	89,75
	<b>Sub Jumlah II</b>	<b>40,00</b>	<b>84,34</b>	<b>84,34</b>
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Faktor pendukung keberhasilan antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam mendukung upaya pembangunan zona integritas dengan melaksanakan tugas pengawasan maupun non pengawasan dengan profesional,

independen dan berintegritas tinggi serta menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergi yang baik dengan APIP daerah dan stakeholders lainnya.

Nilai ZI tahun 2022 sebesar 84,34 lebih rendah 1,18 dibanding tahun 2021 sebesar 85,52. Nilai tahun 2022 sudah menunjukkan kondisi yang baik, penurunan nilai tersebut karena terjadi peningkatan kualitas parameter penilaian ZI salah satunya parameter akuntabilitas pada penilaian tahun 2022 mensyaratkan seluruh sasaran kinerja harus mencapai target, sedangkan pada tahun 2021 hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam penilaian.

Dari hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah mengusulkan kembali untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi, namun dari hasil validasi Inspektorat BPKP bahwa capaian tersebut belum memenuhi syarat untuk diusulkan predikat WBK kepada Kementerian PANRB terutama terkait penguatan akuntabilitas dimana masih terdapat sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 yang belum mencapai target. Target Nilai ZI tahun 2024 sebesar 79 telah terlampaui sehingga nilai yang sudah baik ini perlu terus ditingkatkan agar

Strategi peningkatan kinerja agar dapat mencapai target WBK pada tahun berikutnya antara lain dengan tetap menjaga sikap profesional, independen, dan berintegritas dalam bertugas, mengoptimalkan proses rewiu berjenjang agar kualitas hasil audit dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik, serta tetap melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mendapatkan masukan dan solusi pencapaian target kinerja yang telah disepakati.

## 2) Nilai SAKIP

IKK “Nilai SAKIP” merupakan gambaran efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pengukuran dilakukan atas nilai SAKIP yang diperoleh unit kerja dari hasil evaluasi oleh Inspektorat BPKP atas hasil Penilaian Mandiri SAKIP unit kerja. Evaluasi dilakukan



berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP).

Dari hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP pada tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi NTT memperoleh kategori SAKIP AA (sangat memuaskan) dengan nilai 90,50 atau mencapai mencapai 110,37% dari target nilai SAKIP 82. Berdasarkan interpretasi penilaian akuntabilitas kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di atas bahwa kategori AA menggambarkan telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan oleh seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran telah dilakukan sampai pada level individu.

Nilai hasil evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi NTT per komponen sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Penilaian Mandiri (Self Assessment)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Evaluasi Inspektorat BPKP	
			Nilai PM	%-tase	Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30	27,60	92,00	27,00	90,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30	27,60	92,00	27,60	92,00
3	PELAPORAN KINERJA	15	13,80	92,00	12,90	86,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	22,50	90,00	23,00	92,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	91,50	91,50	90,50	90,50

Nilai 90,50 tersebut meningkat 3,29 dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 87,21. Jika dibandingkan dengan target nilai SAKIP 84 pada tahun 2024 maka realisasi nilai SAKIP tahun 2022 telah melampaui target tahun 2024 dan diharapkan kondisi tersebut bisa tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan setiap tahunnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dengan melakukan perbaikan manajemen kinerja serta evaluasi secara berkala terkait pencapaian kinerja baik melalui rapat pimpinan maupun kegiatan Doa Bersama.

Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sebagai berikut:

Rekomendasi Tahun Lalu		Tindak lanjut Hasil Evaluasi	
No.	Uraian	No.	Uraian
1	Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT untuk menyelaraskan Renstra dengan isu strategis yang tertuang pada APP	1	Koordinasi sudah dilakukan secara <i>online</i> dan menunggu arahan dari Biro MKOT terkait revisi Renstra. Saat ini perbaikan dilakukan pada target Perkin 2022 yang diarahkan

Rekomendasi Tahun Lalu		Tindak lanjut Hasil Evaluasi	
No.	Uraian	No.	Uraian
			pada APP
2	Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan lebih serius, intensif, konsisten, melibatkan seluruh pegawai dan memetakan inovasi pelayanan yang muncul di unit kerja	2	Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah mengusulkan kembali WBK pada Tahun 2022. Beberapa inovasi dikembangkan antara lain aplikasi e-BUM Cloud, e-BLUD, dan MONASQ.
3	Memantau realisasi atas rencana aksi dan melakukan evaluasi atas capaiannya	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP dan aplikasi SIMA.</li> <li>- Evaluasi internal dilakukan melalui rapat pimpinan dan doa bersama dengan dokumentasi dalam bentuk notulen</li> <li>- Perwakilan BPKP menuangkan hasil pemantauan dan analisis kinerja dalam laporan kinerja bulanan</li> </ul>

Strategi peningkatan kinerja dilakukan dengan:

- a) Menindaklanjuti hasil evaluasi tahun 2022 yaitu untuk melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui usulan diklat maupun PPM terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada kesempatan pertama sesuai dengan informasi penyelenggaraan diklat dari Pusdiklatwas BPKP dan menjadwalkan PPM oleh peserta diklat terkait.
- b) Terus melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja melalui rapat pimpinan maupun kegiatan Doa

Bersama serta menindaklanjuti perbaikan yang diperlukan ataupun strategi yang harus dilaksanakan dalam peningkatan kinerja sebagaimana dituangkan dalam notula hasil rapat pimpinan maupun doa bersama.

Kegiatan penting yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja antara lain Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Triwulanan PP39/2006, Laporan Bulanan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur setiap semester, Laporan-laporan tersebut menyajikan antara lain perkembangan capaian kinerja *outcome* dan *output* serta rencana tindak perbaikan setiap bulan, pelaksanaan PKPT, penerbitan laporan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan serta perkembangan entri data penugasan pada aplikasi SIMA dan entri data Sintesa Hasil Pengawasan pada aplikasi SIMA X.

### **3) Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)**

IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern" menilai tingkat efektivitas pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern" diukur dengan membandingkan antara jumlah pengendalian *existing* yang memadai ditambah jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang selesai dan efektif dengan jumlah seluruh pengendalian *existing* ditambah jumlah RTP yang selesai.

Dari pemantauan pelaksanaan manajemen risiko (MR) tahun 2022 terdapat 70 *existing control* yang dinilai memadai dari total 74 *existing control*. Jumlah RTP selesai dilaksanakan sebanyak 4 RTP. Dengan demikian realisasi tahun 2022 sebesar 94,87%  $\{(70+4)/(74+4)\}$  atau mencapai 135,53% dari target 70%.



Keberhasilan capaian kinerja didukung komitmen Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam menerapkan manajemen risiko dengan melakukan evaluasi atas pengendalian yang ada serta merealisasikan rencana tindak pengendalian yang ditetapkan.



Upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penyelesaian RTP dituangkan dalam laporan triwulanan Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Realisasi 94,87% pada tahun 2022 meningkat 0,75% dari realisasi tahun 2021 sebesar 94,12%. Target tahun 2023 dan tahun 2024 belum ditetapkan, namun

Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan tetap terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SPIP dan Manajemen Risiko (MR) agar tetap efektif.

Strategi peningkatan efektivitas pengendalian intern antara lain dengan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP terhadap penerapan manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2022 yaitu:

- a) Mengusulkan peserta diklat manajemen risiko pada kesempatan pertama sesuai informasi penyelenggaraan diklat MR dari Pusdiklarwas BPKP dan menjadwalkan PPM hasil diklat oleh peserta diklat.
- b) Menginventarisasi kembali dokumen-dokumen yang diperlukan dalam memenuhi parameter penilaian manajemen risiko untuk segera dilengkapi.

c) Mengidentifikasi kembali risiko, *existing control*, rencana tindak pengendalian dan komponen manajemen risiko yang masih harus dilengkapi serta merancang pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan efektif untuk tahun 2023.

#### 4) **Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)**

IKK "Persentase Penyelesaian RTP" merupakan bukti penerapan pengelolaan risiko pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

IKK "Persentase Penyelesaian RTP" diukur dengan membandingkan Rencana Tindak Pengendalian yang ditargetkan selama satu tahun dengan realisasi pelaksanaan RTP dilengkapi dengan bukti pendukung pelaksanaan RTP.

Persentase penyelesaian RTP Tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai 100,00% dari target tahun 2021 sebesar 100%.

RTP yang telah diselesaikan adalah :

- a) Melakukan PPM kepada auditor sebelum melakukan penugasan termasuk penyusunan KKA kegiatan assurance dan pembahasan terkait rekomendasi yang akan diberikan;
- b) Optimalisasi pelaksanaan supervisi berjenjang dituangkan dalam Kendali Mutu, Routing Slip dan Draf Laporan;
- c) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau hasil consulting secara berkala (Laporan bulanan hasil Pengawasan dari SIMA TPB)
- d) Melakukan pendampingan atau bimtek pada saat Pemerintah Daerah membuat penganggaran

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dan diharapkan pada akhir tahun renstra (tahun 2024) kondisi ini

dapat terus dipertahankan untuk mewujudkan Pengendalian Intern di Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang semakin baik.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain komitmen Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam mewujudkan Pengendalian Intern yang memadai dengan merealisasikan rencana tindak pengendalian yang telah dirumuskan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mendapatkan *feedback* perbaikan dan strategi pencapaian kinerja serta peningkatan perencanaan pengendalian selanjutnya.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dituangkan dalam laporan triwulanan penerapan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan penilaian mandiri manajemen risiko. Dari hasil penilaian mandiri manajemen risiko Perwakilan BPKP Provinsi NTT memperoleh nilai 97,62 dengan kategori sangat baik, sedangkan dari hasil evaluasi Inspektorat BPKP atas hasil penilaian mandiri Perwakilan BPKP Provinsi NTT memperoleh nilai 75,06 dengan kategori baik.

Strategi peningkatan kinerja antara lain segera menyusun rencana tindak pelaksanaan atas rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat BPKP terhadap penerapan MR pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam laporan Inspektur BPKP Nomor PE.09/LHP-305/IN/2/2022 tanggal 28 November 2022 dan memantau tindak lanjut pelaksanaan rencana tindak tersebut.

#### **5) Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja**

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja diperoleh melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 16 (enam belas) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil survei, pelaksanaan pelayanan publik di Perwakilan BPKP Provinsi NTT secara umum mencerminkan tingkat kualitas Baik dengan nilai 83,66 dari nilai maksimal 100,00.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Sembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Perwakilan BPKP Provinsi NTT yaitu:

- a) Persyaratan;
- b) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c) Waktu penyelesaian;
- d) Biaya/tarif;

- e) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f) Kompetensi pelaksana;
- g) Perilaku pelaksana;
- h) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- i) Saran dan prasarana.

Adapun jumlah responden dari survei ini adalah sebagai berikut:

No.	Profesi	Jumlah
1.	PNS	30
2.	Polri	2
3.	Swasta	1
4.	Pegawai BUMD	1
	<b>Total</b>	<b>34</b>

Target IKK adalah 75. Berdasarkan hasil pengolahan data survei diperoleh hasil Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 83,66 dengan predikat B atau Baik, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

	Nilai Survei Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>
<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>83,66 (Baik)</b>								

Meskipun realisasi tahun 2021 dengan nilai 92,55 terlihat lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 83,66 tidak berarti kondisi tahun 2022 lebih buruk dari tahun 2021 mengingat survei pada tahun 2021 lebih bersifat kuantitatif sedangkan tahun 2022 kualitas survei lebih ditingkatkan dengan menerapkan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dengan responden dari profesi yang lebih beragam dibandingkan responden tahun 2021. Dengan demikian dari hasil

survei tahun 2022 didapatkan kualitas data yang lebih akurat dan komprehensif. Realisasi tahun 2022 ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar pada akhir tahun renstra (tahun 2024) persepsi masyarakat di Wilayah Provinsi NTT terhadap keberadaan dan kebermanfaatan BPKP semakin baik.

#### **6) Skor IKPA Unit Kerja**

IKK “Skor IKPA Unit Kerja” merupakan IKK Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKK “Skor IKPA Unit Kerja” diukur dengan menggunakan hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Nilai IKPA tahun 2022 sebesar 98,35 atau mencapai 103,53% dari target 95. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pada aspek kualitas perencanaan anggaran dengan nilai 94,75, aspek kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai 99,15 dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran/capaian output dengan nilai 100.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja antara lain komitmen pimpinan dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan tepat waktu dengan sinergi dan kolaborasi seluruh bidang/bagian.

Upaya yang telah dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala oleh jajaran pimpinan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi NTT serta

menerapkan strategi kolaborasi antar bidang dalam merealisasikan PKPT.

Nilai IKPA 98,35 meningkat 11,35 dari nilai IKPA tahun 2021 sebesar 87,00 dan telah melampaui target tahun 2024 sebesar 90. Kondisi ini perlu dipertahankan agar target tahun 2024 dapat tetap tercapai.

Strategi peningkatan kinerja antara lain dengan:

- a) Merancang strategi penugasan tahun 2023 dengan berkolaborasi antar bidang secara lebih intens untuk merealisasikan penugasan pengawasan secara tepat waktu.
- b) Mengutamakan penugasan dan kegiatan yang menggunakan DIPA BPKP. Pelaksanaan penugasan dengan dana bantuan kedinasan diprioritaskan pada permintaan yang mendukung Agenda Prioritas Pemerintah atau yang bersifat strategis.
- c) Meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pengawasan dan anggaran.

#### **7) Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja**

IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” merupakan IKK penilaian pengelolaan BMN pada unit kerja mandiri terkait beberapa hal sebagai berikut:

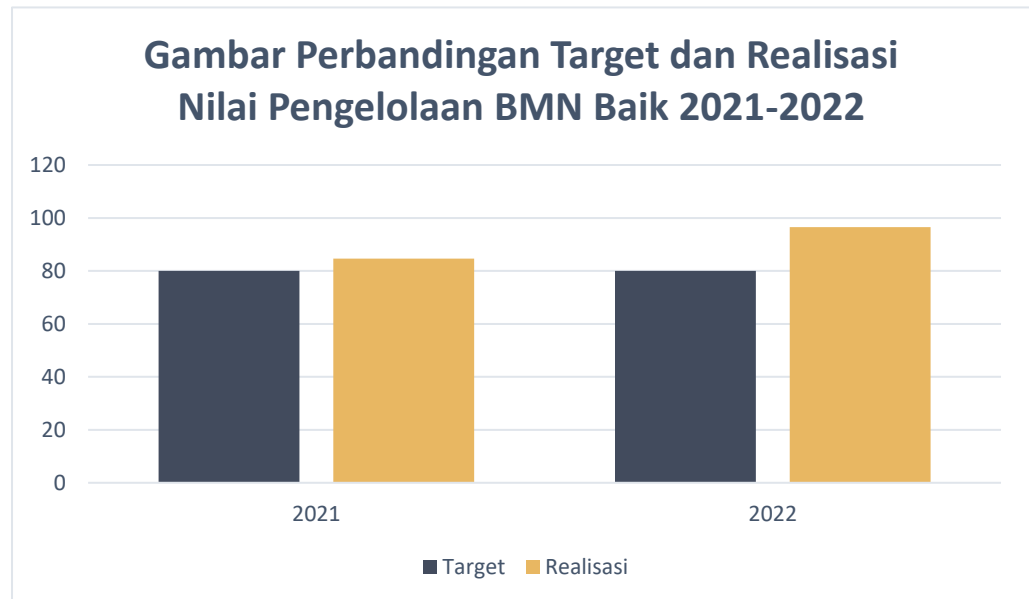
- a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b) Pengadaan;
- c) Penggunaan dan pemanfaatan;
- d) Pengamanan dan pemeliharaan;
- e) Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan;
- f) Penatausahaan; dan
- g) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Target IKK Nilai Pengelolaan BMN baik pada tahun 2022 adalah 80.

Adapun realisasi nilai pada akhir tahun 2022 sebesar 96,52

berdasarkan hasil validasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP. Nilai ini melebihi target yang dicanangkan pada awal tahun 2022 atau mencapai 120,65% dari target awal.

Dalam kurun dua waktu terakhir terjadi peningkatan nilai pengelolaan BMN baik sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.



Dalam gambar tersebut menunjukkan terjadi peningkatan realisasi di tahun 2022. Pada tahun 2021 target nilai pengelolaan BMN baik adalah 80 dan realisasinya sebesar 84,64 atau mencapai sebesar 105,80% dari target. Sedangkan pada tahun 2022 pencapaian realisasi sebesar 96,52 dari target yang sama yaitu 80, atau dengan kata lain pencapaiannya sebesar 120,65% dari target awal. Kondisi pengelolaan BMN baik diharapkan dapat terus dipertahankan agar target pengelolaan BMN baik pada tahun 2024 tetap dapat tercapai atau bahkan dapat ditingkatkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi peningkatan nilai pengelolaan BMN baik tersebut adalah:

- a) Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang baik di Perwakilan BPKP Provinsi NTT;



- b) Pengadaan BMN melalui belanja modal yang sesuai dengan perencanaan kebutuhan;
- c) Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN dengan baik;
- d) Terdapat Standar Operasional Prosedur peminjaman atau penggunaan BMN serta optimalisasi pemeliharaan atas BMN kategori baik, rusak ringan, dan rusak sedang;
- e) Terdapat penghapusan atas BMN dengan kategori rusak berat, yaitu kendaraan roda empat (4) dan penilaian aset hibah dari masyarakat ke unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT oleh KPKNL Kupang;
- f) Terwujudnya penatausahaan BMN yang baik dengan menggunakan media online seperti google sheet untuk memantau jadwal pemeliharaan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan BMN seperti kendaraan dinas dan AC; dan
- g) Terdapat pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap BMN oleh operator BMN dan pihak terkait.

Rata-rata capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja” sebesar 110,49%. Capaian sasaran kegiatan tersebut didukung kegiatan dan layanan bagian umum dengan capaian *output* 100,00%. Anggaran kegiatan sebesar Rp20.655.563.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.381.967.003,00 atau 98,68% dari anggaran sedangkan penggunaan SDM sebanyak 10.340 OH atau 99,16% dari target 10.428 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, sasaran kegiatan dicapai secara efisien ditunjukkan dengan capaian *output* sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian dana sebesar 98,68% dan capaian OH sebesar 99,16%.

### C. Informasi Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi NTT memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi NTT dari Komisi Informasi dimana Perwakilan BPKP Provinsi NTT mendapatkan hasil sebagai berikut

1. Menyandang predikat Badan Publik "Informatif" dan
2. Terbaik ke 2 Se-Provinsi NTT dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Penghargaan disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT pada tanggal 7 Desember 2022 di Aula Utama El Tari Kupang.

### D. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi NTT tahun 2022 sebesar Rp26.549.661.065,00 atau terserap 98,46% dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp26.963.614.000,00. Rincian realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022**  
**Menurut program/ kegiatan**

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Ini	%
<b>089</b>	<b>Alokasi (BPKP)</b>	<b>26.963.614.000,00</b>	<b>26.549.661.065,00</b>	<b>98,46</b>
<b>089.01.CH</b>	<b>Program Pengawasan Pembangunan</b>	<b>6.308.051.000,00</b>	<b>6.167.694.062,00</b>	<b>97,77</b>
<b>3701</b>	<b>Pengawasan Pembangunan di seluruh perwakilan</b>	<b>6.308.051.000,00</b>	<b>6.167.694.062,00</b>	<b>97,77</b>
<b>3701.FAG</b>	<b>Pengawasan Pembangunan</b>	<b>4.169.938.000,00</b>	<b>4.065.638.045,00</b>	<b>97,50</b>
3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	48.930.000,00	48.907.700,00	99,95
3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	3.574.422.000,00	3.473.890.145,00	97,19

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Ini	%
3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	87.573.000,00	87.572.450,00	100,00
3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	33.550.000,00	32.860.000,00	97,94
3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	21.014.000,00	21.011.000,00	99,99
3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	140.910.000,00	138.753.400,00	98,47
3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	187.260.000,00	186.894.650,00	99,80
3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	76.279.000,00	75.748.700,00	99,30
<b>3701.UAG</b>	<b>Pengawasan Pembangunan</b>	<b>2.138.113.000,00</b>	<b>2.102.056.017,00</b>	<b>98,31</b>
3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	1.645.618.000,00	1.616.563.267,00	98,23
3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	409.467.000,00	403.436.850,00	98,53
3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	83.028.000,00	82.055.900,00	98,83
<b>089.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>20.655.563.000,00</b>	<b>20.381.967.003,00</b>	<b>98,68</b>
<b>3676</b>	<b>Pelaksanaan Dukungan Manajemen</b>	<b>20.655.563.000,00</b>	<b>20.381.967.003,00</b>	<b>98,68</b>
<b>3676.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>18.893.807.000,00</b>	<b>18.629.582.903,00</b>	<b>98,60</b>
<b>3676.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>544.730.000,00</b>	<b>543.197.869,00</b>	<b>99,72</b>

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Ini	%
<b>TU 1</b>	<b>Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi dan Umum</b>	<b>443.530.000,00</b>	<b>442.104.541,00</b>	<b>99,68</b>
<b>TU 2</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB</b>	<b>101.200.000,00</b>	<b>101.093.328,00</b>	<b>99,89</b>
<b>3676.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>18.349.077.000,00</b>	<b>18.086.385.034,00</b>	<b>98,57</b>
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>15.584.557.000,00</b>	<b>15.333.141.044,00</b>	<b>98,39</b>
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>2.764.520.000,00</b>	<b>2.753.243.990,00</b>	<b>99,59</b>
<b>3676.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1.761.756.000,00</b>	<b>1.752.384.100,00</b>	<b>99,47</b>
<b>3676.EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>1.319.998.000,00</b>	<b>1.311.140.896,00</b>	<b>99,33</b>
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	766.410.000,00	766.410.000,00	100,00
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	299.559.000,00	296.363.420,00	98,93
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	254.029.000,00	248.367.476,00	97,77
<b>3676.EBB.971</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>441.758.000,00</b>	<b>441.243.204,00</b>	<b>99,88</b>
055	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	441.758.000,00	441.243.204,00	99,88



# Peresmian Rusunawa BPKP





**BAB IV**  
**PENUTUP**

Selain merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai sasaran kegiatan pada tahun 2022, laporan kinerja juga mencerminkan sejauh mana sistem AKIP telah diimplementasikan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur atas 6 (enam) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, menunjukkan bahwa 25 (dua puluh lima) indikator kinerja atau sebesar 86,21% telah mencapai/melampaui target dengan rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar 210,31%. Capaian tertinggi sebesar 2.605% pada indikator kinerja “Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel” diperoleh atas 521 desa yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

Atas indikator kinerja yang capaiannya belum optimal terkait Pemda dengan IEPK Baik, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3, dan Kabupaten/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3 telah dilakukan identifikasi kendala pencapaian target kinerja antara lain:

1. Belum terdapat kebijakan eksplisit atas pengendalian risiko korupsi seperti SOP anti Korupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi, dan respons;
2. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten serta kompetensi SDM Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk mencapai Level 3.



3. Pemerintah Daerah belum memiliki komitmen dan keterbatasan SDM didalam mengimplementasikan Manajemen Risiko;

Capaian tahun 2022 menjadi evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan dalam merumuskan rencana tindak dan strategi perbaikan bagi Perwakilan BPKP untuk meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Oleh karenanya, guna memastikan pencapaian seluruh target kinerja pada Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan strategi-strategi berikut:

1. Mendorong Kepala Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait kebijakan eksplisit atas pengendalian risiko korupsi (SOP anti Korupsi) dan Manajemen Risiko.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang persuasif dan efektif dengan Pemerintah Daerah serta bersinergi dengan APIP Daerah, baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk mencapai Level 3.
3. Secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan keahlian/substantif terkait Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Menyampaikan atensi kewajiban penyusunan laporan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemerintah daerah.
5. Melakukan evaluasi atas penerimaan daerah dengan melihat setiap proses yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka melakukan optimalisasi penerimaan daerah.
6. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pengawasan kolaboratif.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik serta untuk meningkatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja Pengawasan, pada tahun 2022 Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur mendapat penghargaan dari Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal “Informatif” dan terbaik Ke 2 Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian Kinerja BPKP Tahun 2022, didukung penggunaan dana sebesar Rp26.549.611.065 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp26.963.614.000

Akhirnya kita semua berharap agar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pengawasan dalam melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah dalam mewujudkan BPKP hadir bermanfaat dan kian bermakna bagi Indonesia, khusus-nya dalam mengawal NTT bangkit NTT sejahtera.





# LAMPIRAN

- 1.1 Kinerja Outcome**
- 1.2 Perbandingan Kinerja Outcome**
- 1.3 Kinerja Output**
- 1.4 Perbandingan Kinerja Output**
- 1.5 Rekomendasi Strategis**
- 1.6 BUMD Sehat**
- 1.7 BUMDes dengan Lapkeu**
- 1.8 Tata Kelola Pemerintah Provinsi**
- 1.9 Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/ Kota**
- 1.10 Desa Akuntabel**
- 1.11 BLU dengan Akuntabilitas Kinerja Baik**
- 1.12 Desa dengan Pengelolaan Aset Memadai**

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TAHUN 2022**  
(Kinerja Outcome)  
**TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Tahun 2022				Keuangan			SDM			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10	11	12=11/10	
1. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	1.386	1.406	101,46%						
	1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	844.657	852.627	100,94%						
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	3.280	32.907	1003,30%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>401,90%</b>		<b>3.623.336.144,00</b>	<b>3.554.794.846,00</b>	<b>98,11%</b>	<b>16.113</b>	<b>15.901</b>	<b>98,68%</b>
2. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65%						
	2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100%						
	2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>114,22%</b>		<b>108.587.000,00</b>	<b>108.583.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>432</b>	<b>419</b>	<b>96,99%</b>
3. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	8	8	100%						
	3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	2	100%						
	3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	90	102	113,33%						
	3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	2	100%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>103,33%</b>		<b>754.666.000,00</b>	<b>753.321.200,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>2.229</b>	<b>2.166</b>	<b>97,17%</b>
4. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%						
	4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	100	125%						
	4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	2	-	-						
	4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	2	200%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>106,25%</b>		<b>237.914.106,00</b>	<b>229.744.383,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>998</b>	<b>994</b>	<b>99,60%</b>
5. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	APIP	1	1	100%						
	5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	APIP	4	4	100%						
	5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > level 3	Provinsi	1	-	-						
	5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= level 3	Kab/kota	3	2	66,67%						
	5.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >= level 3	Kab/kota	1	-	-						
	5.7	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	521	2605,00%						
	5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	82	410,00%						
	5.9	Jumlah BLUD/BLU dengan MRI >= Level 3	BLUD/BLU	2	2	100,00%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>422,71%</b>		<b>1.583.547.750,00</b>	<b>1.521.200.183,00</b>	<b>96,06%</b>	<b>7.734</b>	<b>7.482</b>	<b>96,74%</b>
6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84,34	112,45%						
	6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	90,50	110,37%						
	6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	94,87	135,53%						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Tahun 2022				Keuangan			SDM		
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10	11	12=11/10
	6.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100%						
	6.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	83,66	111,55%						
	6.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	98,35	103,53%						
	6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	96,52	121%						
<b>Capaian Rata-Rata</b>					<b>113,44%</b>	<b>20.655.563.000,00</b>	<b>20.381.967.003,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>10.428,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>99,16%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>210,31%</b>	<b>26.963.614.000,00</b>	<b>26.549.611.065,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>37.934</b>	<b>37.302</b>	<b>98,33%</b>

**PERBANDINGAN REALISASI SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN**  
**(Perbandingan Kinerja Outcome)**  
**TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja IKK									
			Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2021 (%)	Naik (Turun) %	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Ket. Target 2024
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11=10/4	12	
1. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	1.406,17	126,77	1.279,40	101,46%	31,08%	70,38%	255	N/A	belum direvisi
	1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	852.626,53	361.499,45	491.127,08	100,94%	194,26%	-93,32%	112.930	N/A	belum direvisi
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	32.906,51	20.391,51	12.515	1003,30%	163,85%	839,45%	51.982	63,30%	
2. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	100	N/A	N/A	117,65%	N/A	N/A	85	117,65%	
	2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	7	28,57%	
	2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	N/A	125%	N/A	N/A	N/A	N/A	belum ditetapkan
3. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	8	8	-	100%	100%	0%	9	88,89%	
	3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	3	(1)	100%	150%	-50%	2	100%	
	3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	102	62	40	113,33%	238,46%	-125%	56	182,14%	
	3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	N/A	N/A	100%	-	100%	N/A	0%	indikator baru
4. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100%	100%	-	100	100%	
	4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	125%	133,33%	(8,33%)	90	111%	
	4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	4	0%	
	4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	2	N/A	N/A	200%	N/A	N/A	2	100%	
5. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level	APIP	1	-	1	100%	0%	100%	1	100%	
	5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	APIP	4	3	1	100%	75%	25%	12	33,33%	
	5.3	Jumlah provinsi dengan maturitas SPIP >= level 3	Provinsi	-	-	-	-	-	-	1	0%	
	5.4	Jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP >= level	Kab/kota	2	2	-	66,67%	100%	-33,33%	8,00	25%	
	5.5	Jumlah kabupaten/kota dengan MRI >= level 3	Kab/kota	-	-	-	-	-	-	4	0%	
	5.6	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	521	1.487	(966)	2605%	124,12%	2480,88%	92%	N/A	belum direvisi
	5.7	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	82	5	77	410%	100%	310%	592	N/A	Target belum direvisi
	5.8	Jumlah BLUD/BLU dengan MRI >= Level 3	BLUD/BLU	2	-	2	100%	0%	100%	3	66,67%	
6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	84,34	85,52	(1,18)	112,45%	114,03%	-1,57%	79	106,76%	
	6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	90,50	87,21	3,29	110,37%	109,01%	1,35%	84	107,74%	



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja IKK									
			Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2021 (%)	Naik (Turun) %	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Ket. Target 2024
1	2		3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11=10/4	12
	6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	94,87	N/A	N/A	135,53%	144,80%	-9,27%	Level 3	N/A	belum direvisi
	6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	-	100%	100%	-	Level 3	N/A	belum direvisi
	6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	83,66	N/A	N/A	111,55%	N/A	N/A	N/A	N/A	belum direvisi
	6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	98,35	87	11,35	103,53%	91,58%	11,95%	90	109,28%	
	6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	84,64	(4,64)	121%	105,80%	14,85%	Baik	N/A	belum direvisi

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT PER RINCIAN OUTPUT (RO)**  
**TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Kode/Uraian Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian	Efisien (>=10)	Tidak Efisien (7<10)	Efisien (7>=13)	Tidak Efisien (<13)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	CH.3701.FAG.00.U02.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	6	6	100%	81.243.750,00	81.243.750,00	100,00%	375	377	100,53%					
		CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik / Laporan	21	21	100%	2.552.247.194,00	2.491.702.896,00	97,63%	9.190	9.027	98,23%					
		CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	21	21	100%	913.566.200,00	906.099.500,00	99,18%	6.177	6.126	99,17%					
		CH.3701.FAG.00.U07.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	76.279.000	75.748.700,00	99,30%	371	371	100%					
<b>Jumlah SK1</b>			<b>SHP Topik</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>3.623.336.144</b>	<b>3.554.794.846</b>	<b>98,11%</b>	<b>16.113</b>	<b>15.901</b>	<b>98,68%</b>	<b>Efisien</b>			<b>Efisien</b>	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	CH.3701.FAG.00.005.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	2	2	100%	87.573.000	87.572.450	100,00%	114	109	95,61%					
		CH.3701.FAG.00.012.055 Pengawasan Pembangunan - Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut - Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan	Laporan	1	1	100%	21.014.000	21.011.000	99,99%	318	310	97,48%					
<b>Jumlah SK2</b>			<b>SHP Topik/ Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>108.587.000</b>	<b>108.583.450</b>	<b>100,00%</b>	<b>432</b>	<b>419</b>	<b>96,99%</b>	<b>Efisien</b>			<b>Efisien</b>	

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Kode/Uraian Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian	Efisien (7≥10)	Tidak Efisien (7<10)	Efisien (7≥13)	Tidak Efisien (7<13)		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17		
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	103,33%	CH.3701.FAG.00.U06.052 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	SHP Topik	1	1	100%	187.260.000,00	186.894.650,00	99,80%	580	579	99,83%					
			CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	7	7	100%	242.945.000,00	242.493.643,00	0,00%	589	589	100,00%					
			CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	6	6	100%	324.461.000,00	323.932.907,00	99,84%	1.060	998	94,15%					
<b>Jumlah IKK SS3</b>			<b>SHP Topik</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>754.666.000,00</b>	<b>753.321.200,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>2.229</b>	<b>2.166</b>	<b>97,17%</b>	<b>Efisien</b>		<b>Efisien</b>			
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	106,25%	CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	2	2	100%	164.621.800,00	162.457.400,00	98,69%	793	793	100,00%					
			CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan (ABT)					73.292.306,00	67.286.983,00	91,81%	205	201	98,05%					
<b>Jumlah IKK SS4</b>			<b>SHP Topik</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>237.914.106,00</b>	<b>229.744.383,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>998</b>	<b>994</b>	<b>99,60%</b>	<b>Efisien</b>		<b>Efisien</b>			

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Kode/Uraian Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM				
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian	Efisien (7≥10)	Tidak Efisien (7<10)	Efisien (7≥13)	Tidak Efisien (7<13)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17			
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	422,71%	CH.3701.FAG.51.001.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	48.930.000	48.907.700	99,95%	135	135	100,00%							
		CH.3701.FAG.00.U02.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	59.666.250	57.509.650	96,39%	1.288	1.203	93,40%							
		CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	12	12	100%	242.969.000	224.023.460	92,20%	1.305	1.277	97,85%							
		CH.3701.UAG.00.U09.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	159.029.000	153.448.650	96,49%	924	846	91,56%							
		CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	7	7	100%	705.937.500	672.406.623	95,25%	983	984	100,10%							
		CH.3701.UAG.00.U09.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	250.438.000	249.988.200	99,82%	2.673	2.639	98,73%							
		CH.3701.FAG.00.011.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	33.550.000	32.860.000	97,94%	120	120	100,00%							
		CH.3701.UAG.00.U10.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	1	100%	83.028.000,00	82.055.900,00	98,83%	306	278	90,85%							
<b>Jumlah IKK SSS</b>			<b>SHP Topik</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>1.583.547.750,00</b>	<b>1.521.200.183,00</b>	<b>96,06%</b>	<b>7.734</b>	<b>7.482</b>	<b>96,74%</b>	<b>Efisien</b>		<b>Efisien</b>				

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Kode/Uraian Rincian Output (RO)	Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target (OH)	Realisasi (OH)	Capaian	Efisien_(7≥10)	Tidak Efisien (7<10)	Efisien (7≥13)	Tidak Efisien(7<13)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16	17
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100%	544.730.000,00	543.197.869,00	99,72%	10.428	10.340	13=12/11				
		3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%	18.349.077.000,00	18.086.385.034,00	98,57%							
		3676.EBB.951	Unit	191	191	100%	1.319.998.000,00	1.311.140.896,00	99,33%							
		051 Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	5	5	100%	766.410.000,00	766.410.000,00	100,00%							
		052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi	Unit	124	124	100%	299.559.000,00	296.363.420,00	98,93%							
		053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	62	62	100%	254.029.000,00	248.367.476,00	97,77%							
		3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Paket	3	3	100%	441.758.000,00	441.243.204,00	99,88%							
		055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Paket	3	3	100%	441.758.000,00	441.243.204,00	99,88%							
<b>Jumlah IKK SS6 / Capaian Rata-Rata IKK SS6</b>						<b>100%</b>	<b>20.655.563.000,00</b>	<b>20.381.967.003,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>10.428</b>	<b>10.340</b>	<b>99,16%</b>	<b>Efisien</b>		<b>Efisien</b>	
<b>Total</b>						<b>100%</b>	<b>26.963.614.000,00</b>	<b>26.549.611.065,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>37.934,00</b>	<b>37.302,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>Efisien</b>		<b>Efisien</b>	

**PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT PER RINCIAN OUTPUT (RO)  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)	Kinerja RO							
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun) Realisasi	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)	%Naik (Turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	CH.3701.FAG.00.U02.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	6	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	4	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	57	N/A	N/A	100%	N/A	#VALUE!
		CH.3701.FAG.00.U07.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	N/A	4	N/A	100%	100	-99,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	CH.3701.FAG.00.005.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	2	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)	Kinerja RO							
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun) Realisasi	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)	%Naik (Turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9	
	CH.3701.FAG.00.012.055 Pengawasan Pembangunan - Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut - Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan	Laporan	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	CH.3701.FAG.00.U06.052 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	SHP	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	7	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	6	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	2	NA	NA	100%	NA	NA
		CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan (ABT)							

Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)	Kinerja RO						
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun) Realisasi	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)	%Naik (Turun) Capaian
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	CH.3701.FAG.51.001.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	CH.3701.FAG.00.U02.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	CH.3701.UAG.00.U03.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	12	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	CH.3701.UAG.00.U09.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	CH.3701.FAG.51.003.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	7	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	CH.3701.UAG.00.U09.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A



Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)	Kinerja RO							
		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun) Realisasi	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)	%Naik (Turun) Capaian	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9	
	CH.3701.FAG.00.011.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA - Pelaksanaan Pengawasan	SHP Topik	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	CH.3701.UAG.00.U10.052 Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha - Pelaksanaan Pengawasan	SHP	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	<b>3676.EBA.962</b> <b>Layanan Umum</b>	Layanan	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		<b>3676.EBA.994</b> <b>Layanan Perkantoran</b>	Layanan	1	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		<b>3676.EBB.951</b>							
	051 Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	5	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi	Unit	124	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	62	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
		<b>3676.EBB.971</b> <b>Layanan Prasarana Internal</b>							
	055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Paket	3	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

**TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI STRATEGIS ATAS HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

NO.	ISU STRATEGIS	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SURAT SEKDA
I	PENGAWASAN ISU STRATEGIS NASIONAL			
A	Pengawasan Covid 19			
		<b>Program Vaksinasi</b>	Dalam rangka mendukung target Herd Immunity, disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk: a. Menyusun kebijakan perencanaan dan program dalam RKPD 2022 yang mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi secara holistic dan memastikan keselarasan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022; b. Meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri terkait data penerimaan dan penggunaan vaksin di TNI dan Polri.	BU.700/133/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako</b>	Saran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur agar mengingatkan Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	BU.700/134/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Walikota Kupang 2. Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)</b>	Saran dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyaluran BLT-DD kepada seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: a. Mempertimbangkan DTKS dalam penetapan KPM agar penyaluran BLT-DD lebih efektif. b. Melakukan perekaman pada aplikasi OM-SPAN secara tepat waktu agar prinsip transparansi tetap terjaga.	BU.700/135/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Walikota Kupang 2. Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>BLT Kemiskinan Ekstrem</b>	Saran perbaikan yang telah kami berikan kepada Kepala Daerah agar memerintahkan perangkat daerah terkait BLT Ekstrem menetapkan KPM, menetapkan besaran BLT dan menyelesaikan pelaporan penggunaan dana APBD II maupun Dana Desa sesuai peraturan yang telah ditetapkan.	BU.700/136/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Bupati Timor Tengah Selatan 2. Bupati Rote Ndao 3. Bupati Sumba Timur 4. Bupati Sumba Tengah 5. Bupati Manggarai Timur

NO.	ISU STRATEGIS	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SURAT SEKDA
<b>B</b>	<b>AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH</b>			
		<b>Perencanaan dan Penganggaran APBD</b>	Saran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran bagi seluruh pemda se-Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: a. Mengadakan pelatihan pada perangkat daerah yang bergerak pada sektor perencanaan dan penganggaran untuk seluruh pemda se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghadirkan narasumber yang kompeten; b. Memperkuat peran APIP daerah dalam rangka pengawasan terkait perencanaan dan penganggaran.	BU.700/137/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Walikota Kupang 2. Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>C</b>	<b>TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH</b>			
		<b>SPIP TERINTEGRASI (SPIP, MR, IEPK)</b>	saran kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati agar: a. Menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah pada masing-masing pemerintah daerah untuk menyusun kinerja dan indikator kinerja yang ada di Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja telah berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur, relevan, cukup, selaras, dan dapat menjawab sasaran prioritas kepala daerah; b. Segera menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko untuk diaplikasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses implementasi SPIP di lingkungan pemerintah daerah; c. Mengoptimalkan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan sesuai sasaran prioritas kepala daerah, memperbaharui register risiko perangkat daerah, dan penggunaan data competency gap dalam pengembangan kompetensi auditor pada Inspektorat Daerah; d. Menyiapkan kebijakan antikorupsi, menumbuhkan kesadaran untuk mengelola risiko korupsi, dan melakukan pembelajaran antikorupsi baik secara internal maupun eksternal; e. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada LHP BPK, berkomitmen untuk meraih Opini WTP atas LKPD bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan Opini WDP, dan menyelesaikan permasalahan aset daerah Saran Perbaikan terkait pemenuhan kapabilitas APIP kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Inspektur Daerah agar: a. Menganggarkan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; b. Pemenuhan jumlah auditor berdasarkan hasil rekomendasi BPKP; c. Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan dengan bekerja sama dengan Pusdiklawas BPKP; d. Melakukan telaah sejawat antar Inspektorat Daerah melalui forum AAIPi; Menyusun PKPT Berbasis Risiko dengan memperhatikan Isu Strategis dan Prioritas Pemda.	BU.700/138/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Walikota Kupang 2. Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>		
<b>D</b>	<b>Pengamanan Keuangan Daerah/Negara</b>			
		<b>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan pengukuran IEPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan hasil berupa komitmen dari pimpinan OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi sehingga dapat meninggalkan pencapaian IEPK	BU.700/139/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Bupati Manggarai Timur
<b>E</b>	<b>Sektor Prioritas</b>			
	<b>Sektor Pendidikan</b>			

NO.	ISU STRATEGIS	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SURAT SEKDA
		<b>Pengawasan atas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP)</b>	Atas hasil pengawasan tersebut, disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengingatkan Kabupaten/Kota Penerima bantuan KIP dan PIP untuk memperoleh ketepatan sasaran penerima manfaat.	BU.700/140/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	ISU STRATEGIS	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SURAT SEKDA
<b>F</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>			
		<b>Pengawasan Penurunan Stunting</b>	Disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendorong para Bupati/Walikota agar melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta menginstruksikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan beberapa langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja program Penurunan Stunting.	BU.700/141/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: 1. Walikota Kupang 2. Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>Program Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah</b>	Disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk Bupati Sumba Tengah menyelaraskan kebijakan perencanaan dalam rangka memanfaatkan hasil PSN untuk mendukung ketahanan pangan.	BU.700/146/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Bupati Sumba Tengah
		<b>Sektor Pariwisata</b>	Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur disarankan untuk meningkatkan efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mendorong Pemda penerima Hibah Pariwisata untuk melakukan pengelolaan Dana Hibah dengan tertib.	BU.700/142/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
		<b>Tata Kelola Penanggulangan Bencana</b>	Disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk: a. Mensinergikan perencanaan penanggulangan bencana provinsi/kabupaten/kota; b. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana; c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan.	BU.700/147/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	ISU STRATEGIS	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SURAT SEKDA
II	PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH			
A	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Labuan Bajo	Atas hal-hal diatas, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendorong Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait: a. Melakukan serah terima pengelolaan sementara atas paket-paket pekerjaan yang telah selesai pelaksanaannya bersama satker terkait; b. Menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan/mengganti atas kerusakan atau penurunan kualitas dari hasil pekerjaan infrastruktur; c. Merencanakan pembangunan jalan menuju lokasi pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Sampah Proses Termal dan pekerjaan Optimalisasi TPA Warloka Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dan merencanakan pemanfaatan hasil/output dari pengelolaan sampah pada proyek pembangunan Pembangunan Pengelolaan Sampah Proses Termal di Warloka Kabupaten Manggarai Barat.	BU.700/144/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores
B	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Food Estate	Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah	Disarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai lokasi program Food Estate untuk memanfaatkan dan mengelola bantuan yang telah diberikan dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat.	BU.700/143/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Kepada: Bupati Sumba Tengah

**HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS  
PENGENDALIAN KORUPSI PADA BUMD  
TAHUN 2022  
PERWKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama BUMD	Prov/Kab/Kota	GCG	Evaluasi Kinerja	MR	Efektifitas SPI	Kapabilitas SPI	IEPK
1	PDAM Tirta Bening Lontar	Kota Kupang	-	Sehat	-	-	-	-
2	Perumdam Matawai Amahu	Kabupaten Sumba Timur	-	Sehat	-	-	-	-
3	PDAM Kab. Lembata	Kabupaten Lembata	-	Sehat	-	-	-	-
4	Perumdam Tirta Cendana	Kabupaten Timor Tengah Utara	-	Sehat	-	-	-	-
5	Perumdam Wae Mbeliling	Kabupaten Manggarai Barat	-	Sehat	-	-	-	-
6	Perumdam Tirta Komodo	Kabupaten Manggarai	-	Sehat	-	-	-	-
7	Perumdam Ina Gelekat	Kabupaten Flores Timur	-	Sehat	-	-	-	-
8	PDAM Tirta Lontar	Kabupaten Kupang	-	Sehat	-	-	-	-
9	PDAM Kab. Belu	Kabupaten Belu	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
10	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
11	Perumdam Wair Puan	Kabupaten Sikka	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
12	PDAM Tirta Kelimutu	Kabupaten Ende	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
13	Perumdam Tirta Banari	Kabupaten Ngada	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
14	Perumdam Nusa Kenari	Kabupaten Alor	-	Kurang Sehat	-	-	-	-
15	PDAM Kab. Rote Ndao	Kabupaten Rote Ndao	-	Kurang Sehat	-	-	-	-

**BUM DESA YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	No	BUM Desa	Pendapatan	Beban	Laba	Aset	Kewajiban	Modal	PADes	Jml SDM	Prokudes	KSO UEM	B. Sarpras	Ket
<b>Kabupaten Kupang, S-924/PW24/4/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 (Monitoring)</b>														
<b>Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
1	1.	Bilofog	4.805.000	0	4.805.000	100.000.000	0	100.000.000	864.900	11	Tidak	Ya	0	
2	2.	Timor Permai	2.515.000	0	2.515.000	125.000.000	0	125.000.000	0	9	Tidak	Ya	0	
3	3.	Bumdes Damai	55.832.500	0	55.832.500	175.000.000	0	175.000.000	8.374.800	10	Ya	Ya	0	
4	4.	Harapan Bersama	10.988.250	0	10.988.250	307.527.791	0	307.527.791	1.098.825	7	Tidak	Ya	0	
5	5.	Maju Bersama	11.330.000	0	11.330.000	111.000.000	0	111.000.000	1.699.500	11	Tidak	Ya	0	
6	6.	Sion	18.101.000	0	18.101.000	50.000.000	0	50.000.000	3.620.200	5	Ya	Ya	0	
7	7.	Rium Jaya	24.031.500	0	24.031.500	424.000.000	0	424.000.000	3.604.700	5	Ya	Ya	0	
8	8.	Tetus	15.710.000	0	15.710.000	175.000.000	0	175.000.000	3.142.000	9	Ya	Ya	0	
9	9.	Tunas Baru	6.308.000	0	6.308.000	139.423.851	0	139.423.851	946.200	15	Ya	Ya	0	
10	10.	Nekafmese	5.147.550	0	5.147.550	211.800.000	0	211.800.000	1.802.000	10	Tidak	Ya	0	
11	11.	Tafena Hit Kuan	40.051.800	0	40.051.800	306.196.770	0	306.196.770	8.399.000	11	Ya	Ya	0	
12	12.	Tafena To	153.875.000	0	153.875.000	305.475.500	-2	305.475.500	3.846.875	12	Ya	Tidak	0	
13	13.	Teutkuan	5.995.537	0	5.995.537	200.000.000	0	200.000.000	1.498.884	8	Tidak	Ya	0	
14	14.	Mafutnek	25.500.000	0	25.500.000	150.000.000	0	150.000.000	2.550.000	10	Tidak	Ya	0	
15	15.	Kalali	9.094.941	0	9.094.941	150.000.000	0	150.000.000	0	11	Tidak	Tidak	0	
16	16.	Tafeu Monef	2.702.458	0	2.702.458	52.702.458	0	52.702.458	0	9	Tidak	Tidak	0	
17	17.	Nekamese	24.656.500	0	24.656.500	159.587.310	0	159.587.310	4.931.313	8	Ya	Ya	0	
<b>Kabupaten Kupang, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
<b>Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
<b>ST-152/PW24/4/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Bimbingan Teknis Tatakelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa pada Kabupaten Kupang</b>														<b>Bimtek</b>
18	1.	Tunas Baru	3.611	2.587.003	-2.583.392	139.423.851	0	139.423.851	0	3	Ya	Ya	0	
19	2.	Ina Huk	305.500	0	305.500	254.887.191	0	254.887.191	0	3	Ya	Ya	0	
20	3.	Mutiara	9.369.500	1.200.000	8.169.500	310.615.400	0	310.615.400	0	3	Ya	Ya	0	
	4.	Tafena Hit Kuan	-6	64.875.000	-64.875.006	161.694.495	0	161.694.495	0	3	Ya	Ya	0	
	5.	Tafena To	19.150.000	12.217.000	6.933.000	305.475.500	0	305.475.500	0	3	Ya	Ya	0	
	6.	Teutkuan	16.260.000	0	16.260.000	82.691.733	0	82.691.733	0	3	Ya	Ya	0	
<b>Kabupaten Kupang, ST-998/PW24/4/2021 Tanggal 13 Desember 2021</b>														
<b>Asistensi Implementasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kupangdi Kantor DPMD Kab. Kupang</b>														<b>Asistensi</b>
21	1.	Lima Bersaudara	21.000.000	18.050.000	2.950.000	102.950.000	0	102.950.000	0	4	Tidak	Tidak	0	
22	2.	Maju Bersama	15.600.000	13.200.000	2.400.000	127.400.000	0	127.400.000	0	0	Tidak	Tidak	0	
	3.	Nekamese	24.874.300	107.813.734	-82.939.434	159.587.310	0	159.587.310	0	3	Tidak	Tidak	0	
<b>Kabupaten Timor Tengah Selatan, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
<b>Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
<b>ST-441/PW24/4/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten TTS</b>														<b>Asistensi</b>
23	1.	Nekamese	30.243.000	8.010.000	22.233.000	168.290.000	0	168.290.000	0	3	Ya	Ya	0	
<b>Kabupaten Belu, S-924/PW24/4/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 (Monitoring)</b>														
<b>Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
24	1.	Silawan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
25	2.	Lariki	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
26	3.	Fatuketi	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
<b>Kabupaten Flores Timur, S-924/PW24/4/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 (Monitoring)</b>														
<b>Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
27	1.	Honihama	43.910.538	39.195.485	4.715.053	0	0	4.000.000	0	5	Ya	Ya	0	
28	2.	Bumdes Karya Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
29	3.	Onet Tou	120.313.969	57.623.693	62.690.276	126.041.455	0	126.041.455	0	6	Ya	Ya	0	
30	4.	Helero	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
31	5.	Boru Lestaei	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
32	6.	Putu Hara Dike	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
33	7.	Sonata	0	0	0	187.414.500	2.500.000	184.914.500	0	9	Tidak	Tidak	0	
34	8.	Mikel Duli Tukan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	



No	No	BUM Desa	Pendapatan	Beban	Laba	Aset	Kewajiban	Modal	PADes	Jml SDM	Prokudes	KSO UEM	B. Sarpras	Ket
35	9.	Bao boran	27.966.000	11.435.250	16.530.750	0	0	0	4.555.050	8	Ya	Ya	50.000.000	
<b>Kabupaten Flores Timur, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
<b>Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
	1.	Honihama	0	0	0	0	0	0	0	5	Ya	Ya	0	
	2.	Onet Tou	118.363.216	49.649.946	68.713.270	126.041.455	0	126.041.455	8.456.777	6	Ya	Ya	250.000.000	
	3.	Sonata	2.906.000	0	2.906.000	0	1.057.000	-1.057.000	0	9	Tidak	Tidak	0	
<b>Kabupaten Sikka, S-924/PW24/4/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 (Monitoring)</b>														
<b>Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
36	1.	Permai Koting D	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
37	2.	Bida Mitan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
38	3.	Ai Nita	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
39	4.	Maju Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
40	5.	Domus Caritas	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
41	6.	Bumdes Wairpuan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
42	7.	Mitra Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
43	8.	Karya Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
	9.	Melati Dewa	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
44	10.	Igo Enga	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
45	11.	Ud Cermin Kasih	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
46	12.	Bukit Keling	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
47	13.	Pu'An To'A	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
<b>Kabupaten Sikka, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
<b>Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
<b>ST-247/PW24/4/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Asistensi Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa pada Kabupaten Sikka</b>														
48	1.	Watu Jong	37.309.400	8.166.667	29.142.733	136.492.733	0	136.492.733	0	3	Tidak	Tidak	0	
49	2.	Iiko Mior	0	800.000	-800.000	51.128.061	0	51.128.061	0	3	Tidak	Tidak	0	
50	3.	Menuam Balik	85.125.000	76.500.000	8.625.000	108.625.000	0	108.625.000	0	4	Tidak	Tidak	0	
51	4.	Melati Dewa	5.217.000	19.598.678	-14.381.678	889.431.522	54.244.300	835.187.222	0	4	Ya	Tidak	0	
52	5.	Bumdes Karya Bersama	250.000	6.871.157	-6.621.157	91.072.013	0	91.072.013	0	10	Tidak	Tidak	0	
53	6.	Subur Makmur	0	11.018.500	-11.018.500	38.981.500	0	38.981.500	0	3	Ya	Tidak	0	
54	7.	Germades Gera	32.998.800	93.828.167	-60.829.367	-10.829.367	0	-10.829.367	0	3	Ya	Tidak	0	
55	8.	Langir Mandiri	19.596.000	7.874.000	11.722.000	126.326.000	0	126.326.000	0	3	Ya	Tidak	0	
56	9.	Suru Muri	11.200.000	0	11.200.000	116.176.601	0	116.176.601	0	4	Ya	Tidak	0	
57	10.	Teguh Mandiri	48.949.750	58.436.000	-9.486.250	4.055.212.894	100.000	4.055.112.894	0	4	Ya	Tidak	0	
<b>Kabupaten Ende, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
<b>Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
<b>ST-409/PW24/4/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ende</b>														
58	1.	Au Wula	129.863.700	96.164.350	33.699.350	229.449.350	500.000	228.949.350	0	6	Ya	Tidak	0	
59	2.	Satu Tekad	31.000.000	19.200.000	11.800.000	79.065.000	0	79.065.000	0	8	Tidak	Tidak	0	
60	3.	Peni Nge Wesi Nuwa	3.670.000	350.000	3.320.000	103.320.000	0	103.320.000	0	2	Tidak	Tidak	0	
61	4.	Tau Rambu	114.282.000	70.612.000	43.670.000	201.430.000	0	201.430.000	0	4	Tidak	Tidak	0	
62	5.	Sinar Ondo	3.600.000	0	3.600.000	140.000.000	0	140.000.000	0	4	Tidak	Tidak	0	
63	6.	Rea Jaya	700.000	0	700.000	30.700.000	0	30.700.000	0	3	Tidak	Tidak	0	
64	7.	Wolotopo	421.235.000	379.200.000	42.035.000	158.560.000	0	158.560.000	2.479.500	7	Tidak	Tidak	0	
65	8.	Kita	12.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	3	Tidak	Tidak	0	
66	9.	Ana Mamo Konde Ratu	2.000.000	1.500.000	500.000	100.500.000	0	100.500.000	0	4	Tidak	Tidak	0	
67	10.	Kekandere	3.000.500	1.500.000	1.500.500	11.500.500	0	11.500.500	0	5	Tidak	Tidak	0	
<b>Kabupaten Ngada, S-924/PW24/4/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 (Monitoring)</b>														
<b>Monitoring Pembuatan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>														<b>Monitoring Pandan Desa</b>
68	2.	Bumdes Ubedolumolo	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
69	3.	Bumdes Piga	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
70	4.	Maju Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
71	5.	Sedang Mekar	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
72	6.	Narusawu	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	
73	7.	Batajawa	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak	Tidak	0	

No	No	BUM Desa	Pendapatan	Beban	Laba	Aset	Kewajiban	Modal	PADes	Jml SDM	Prokudes	KSO UEM	B. Sarpras	Ket
<b>Kabupaten Ngada, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur														Monitoring Pandan Desa
ST-424/PW24/4/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ngada														Asistensi
1.		Sedang Mekar	18.430.000	0	18.430.000	111.570.000	0	111.570.000	0	3	Ya	Tidak		0
2.		Narusawu	15.872.600	15.072.000	800.600	496.059.207	49.513.188	446.546.019	0	3	Ya	Tidak		0
3.		Batajawa	3.627.000	33.647.000	-30.020.000	109.395.670	0	109.395.670	0	3	Ya	Tidak		0
74	4.	Wonga Wali	0	0	0	560.713.756	92.955.756	467.758.000	0	6	Tidak	Tidak		0
75	5.	Sinar Bowali	18.636.000	19.661.199	-1.025.199	156.774.800	0	156.774.800	0	6	Ya	Ya		0
76	6.	Soko Tok	25.000.000	32.530.272	-7.530.272	140.905.728	0	140.905.728	0	4	Ya	Ya		0
<b>Kabupaten Manggarai Barat, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur														Monitoring Pandan Desa
ST-405/PW24/4/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Barat														Asistensi
77	1.	Batu Cermi	139.316.388	56.201.999	83.114.389	756.618.602	0	756.618.602	32.788.140	3	Tidak	Tidak	50.000.000	0
78	2.	Pongkor Lestari	30.085.000	2.010.999	28.074.001	130.883.450	0	130.883.450	4.457.000	3	Ya	Ya	50.000.000	0
79	3.	Gorontalo	4.375.000	3.100.000	1.275.000	564.329.878	25.814.000	538.515.878	8.014.291	3	Tidak	Ya	300.000.000	0
80	4.	Watu Tiri	18.275.000	10.606.000	7.669.000	88.669.000	0	88.669.000	0	6	Ya	Tidak		0
81	6.	Kolarek	900.000	27.550.000	-26.650.000	44.800.000	19.800.000	25.000.000	0	6	Ya	Tidak		0
82	8.	Poco Rutang	192.731.096	96.850.000	95.881.096	204.581.096	-17.200.000	221.781.096	0	6	Ya	Ya		0
83	10.	Liang Ndara Jaya	21.460.000	0	21.460.000	80.000.000	0	80.000.000	0	3	Tidak	Tidak		0
<b>Kabupaten Manggarai Timur, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur														Monitoring Pandan Desa
ST-410/PW24/4/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi SIA BUMDesa pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Timur														Asistensi
84	1.	Raka Cama	6.313.034	29.547.985	-23.234.951	280.581.610	0	280.581.610	0	3	Ya	Ya		0
85	2.	Arus Harapan Arus	4.400.000	0	4.400.000	4.460.000	0	4.460.000	0	3	Ya	Ya		0
86	3.	Multi Guna	6.401.905	0	6.401.905	151.075.653	0	151.075.653	0	3	Ya	Ya		0
87	4.	Jari Cama Laing	17.614.835	23.025.000	-5.410.165	222.372.835	80.000.000	142.372.835	0	3	Ya	Ya		0
88	5.	Satar Padut	3.400.000	4.531.309	-1.131.309	649.158.063	0	649.158.063	0	3	Ya	Ya		0
89	6.	Bantang Cama	18.720.000	29.230.770	-10.510.770	28.531.980	0	28.531.980	0	3	Ya	Ya		0
90	7.	Menara	870.000	8.783.000	-7.913.000	40.333.492	0	40.333.492	0	3	Ya	Ya		0
91	8.	Cinta Damai	137.049.000	127.317.000	9.732.000	108.187.001	0	108.187.001	0	3	Ya	Ya		0
92	9.	SA NAI GOLO TOLANG	2.578.000	640.000	1.938.000	426.938.000	0	426.938.000	0	3	Ya	Ya		0
93	10.	Tungku Mose	730.295	12.059	718.236	47.559.797	0	47.559.797	0	3	Ya	Ya		0
<b>Kabupaten Malaka, ST-702/PW24/4/2021 Tanggal 20 September 2021</b>														
Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende Sikka, dan Flores Timur														Monitoring Pandan Desa
ST-442/PW24/4/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Asistensi Implementasi Aplikasi SIA BUMDesa pada Kabupaten Malaka														Asistensi
94	1.	Rai Tiris	200.000	26.375.000	-26.175.000	325.501.625	0	325.501.625	0	2	Ya	Tidak		0
95	2.	Halma	1.233.000	3.600.000	-2.367.000	123.525.000	1.150.000	122.375.000	0	2	Ya	Tidak		0
96	3.	Kamanasa Maju Bersama	29.310.000	0	29.310.000	29.310.000	0	29.310.000	0	5	Ya	Tidak		0
97	4.	Sinar Harapan	1.000.000	5.999.998	-5.000.000	134.000.000	0	134.000.000	0	2	Ya	Tidak		0
98	5.	Beirain Wesuma	5.059.500	875.000	4.184.500	4.967.965	0	4.967.965	0	4	Ya	Tidak		0
99	6.	Kroman Taaba	10.000.500	224.000	9.776.500	110.176.500	0	110.176.500	0	5	Ya	Tidak		0
100	7.	Fore Nurak	0	26.000.000	-26.000.000	331.909.795	0	331.909.795	0	2	Ya	Tidak		0
101	8.	Kufeu Mrian	3.475.000	0	3.475.000	20.990.000	2.500.000	18.490.000	0	6	Ya	Tidak		0
102	9.	Karya Maju	10.010.000	0	10.010.000	260.010.000	0	260.010.000	0	3	Ya	Tidak		0

selain itu:

- 1 Tahun 2020 diadakan Bimtek Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa pada Kabupaten Kupang Tahun 2020, sesuai ST Nomor 64/PW24/4/2020 Tanggal 4 Februari 2020
- 2 Tahun 2020 diadakan Bimtek Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa pada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020, sesuai ST Nomor 62/PW24/4/2020 Tanggal 4 Februari 2020
- 3 Tahun 2021 diadakan Sosialisasi SIA BUMDesa di Wilayah Provinsi NTT pada tanggal 19 Maret, sesuai ST Nomor 150/PW24/4/2021 Tanggal 17 Maret 2021

**TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI, DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMDA PROVINSI  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Pemerintah Provinsi	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,925	2	Berkembang	3,000	3	<i>Delivered</i>	2,613	2		2,840	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik

**TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI, DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMDA KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Kabupaten/Kota	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kota Kupang	2,697	2	Berkembang	1,570	1	<i>Initial</i>	2,201	2	-	2,502	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
2	Kabupaten Alor	2,584	2	Berkembang	0,180	1	<i>Initial</i>	2,162	2	-	2,518	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
3	Kabupaten Belu	2,950	2	Berkembang	3,000	3	<i>Delivered</i>	2,913	2	-	2,990	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
4	Kabupaten Ende	2,316	2	Berkembang	1,790	1	<i>Initial</i>	1,878	1	-	2,880	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
5	Kabupaten Flores Timur	2,138	2	Berkembang	3,000	3	<i>Delivered</i>	2,198	2	-	2,735	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
6	Kabupaten Kupang	2,122	2	Berkembang	1,000	1	<i>Initial</i>	1,085	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
7	Kabupaten Lembata	2,109	2	Berkembang	0,425	1	<i>Initial</i>	2,066	2	-	2,253	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
8	Kabupaten Malaka	2,252	2	Berkembang	2,330	2	<i>Structured</i>	1,544	1	-	2,198	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
9	Kabupaten Manggarai	2,954	2	Berkembang	3,000	3	<i>Delivered</i>	2,310	2	-	2,340	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
10	Kabupaten Manggarai Barat	2,698	2	Berkembang	2,020	2	<i>Structured</i>	2,584	2	-	1,490	1	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi dengan kondisi buruk

No	Nama Kabupaten/Kota	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Kabupaten Manggarai Timur	2,239	2	Berkembang	2,140	2	<i>Structured</i>	1,116	1	-	2,733	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
12	Kabupaten Nagekeo	2,783	2	Berkembang	1,415	1	<i>Initial</i>	2,661	2	-	2,403	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
13	Kabupaten Ngada	2,313	2	Berkembang	2,470	2	<i>Structured</i>	1,921	1	-	1,303	1	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi dengan kondisi buruk
14	Kabupaten Rote Ndao	2,046	2	Berkembang	1,080	1	<i>Initial</i>	1,115	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
15	Kabupaten Sabu Raijua	2,398	2	Berkembang	0,400	1	<i>Initial</i>	1,067	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
16	Kabupaten Sikka	3,000	3	Terdefinisi	2,400	2	<i>Structured</i>	1,780	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
17	Kabupaten Sumba Barat	2,178	2	Berkembang	2,420	2	<i>Structured</i>	1,115	1	-	2,368	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	2,382	2	Berkembang	1,000	1	<i>Initial</i>	2,364	2	-	2,808	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
19	Kabupaten Sumba Tengah	2,070	2	Berkembang	1,000	1	<i>Initial</i>	1,094	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
20	Kabupaten Sumba Timur	3,009	3	Terdefinisi	3,000	3	<i>Delivered</i>	2,325	2	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,266	2	Berkembang	2,420	2	<i>Structured</i>	1,117	1	-	2,148	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik

No	Nama Kabupaten/Kota	SPIP			Kapabilitas APiP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	2,304	2	Berkembang	2,000	2	<i>Structured</i>	1,083	1	-	2,000	2	Kecenderungan pengelolaan risiko korupsi semakin baik

**DESA YANG PENGELOLAAN KEUANGANNYA AKUNTABEL  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KABUPATEN ENDE											
1	DESA AE NDOKO	51	DESA KEDEBODU	101	DESA NAKURAMBA	151	DESA PORA	201	DESA TINABANI	251	DESA WOLOTOLU TIMUR
2	DESA AEBARA	52	DESA KEKANDERE	102	DESA NANGANESA	152	DESA PUUTARA	202	DESA TITWEREA	252	DESA WOLOTOTO
3	DESA AEJETI	53	DESA KEKASEWA	103	DESA NATANANGGE	153	DESA PUUTUGA	203	DESA TIWUSORA	253	DESA WONDA
4	DESA AELIPO	54	DESA KELIKIKU	104	DESA NDENGARONGGE	154	DESA RABURIA	204	DESA TIWUTEWA	254	DESA WORHOPAPA
5	DESA AEMURI	55	DESA KELISAMBA	105	DESA NDETUNDORA I	155	DESA RANAKOLO	205	DESA TOMBERABU I	255	DESA ZOZOZEA
6	DESA AEWORA	56	DESA KELIWUMBU	106	DESA NDETUNDORA II	156	DESA RANAKOLO SELATAN	206	DESA TOMBERABU II		
7	DESA ANARAJA	57	DESA KERIREA	107	DESA NDETUNDORA III	157	DESA RANDORAMA	207	DESA TONGGOPAPA		
8	DESA BHERAMARI	58	DESA KOANARA	108	DESA NDETUREA	158	DESA RANDORIA	208	DESA TOU		
9	DESA BOAFAEO	59	DESA KOBALIBA	109	DESA NDIKOSAPU	159	DESA RANDOTONDA	209	DESA TOU BARAT		
10	DESA BOKASAPE TIMUR	60	DESA KOLIKAPA	110	DESA NDITO	160	DESA RANGA	210	DESA TOU TIMUR		
11	DESA BOROKANDA	61	DESA KOTABARU	111	DESA NDONDO	161	DESA RANGALAKA	211	DESA TURUNALU		
12	DESA BU TANALAGU	62	DESA KURU	112	DESA NDORIWUI	162	DESA RANGGATALO	212	DESA ULUDALA		
13	DESA DEMULAKA	63	DESA KURULIMBU	113	DESA NDORUREA I	163	DESA RANORAMBA	213	DESA UNGGU		
14	DESA DETUARA	64	DESA KURULIMBU SELATAN	114	DESA NDUARIA	164	DESA RAPORENDU	214	DESA UZURAMBA		
15	DESA DETUBELA	65	DESA KURUSARE	115	DESA NDUNGGGA	165	DESA RAPOWAWO	215	DESA UZURAMBA BARAT		
16	DESA DETUENA	66	DESA LIABEKE	116	DESA NEMBORAMBA	166	DESA RATEMANGGA	216	DESA UZUZOZO		
17	DESA DETUKELI	67	DESA LIKANAKA	117	DESA NEOTONDA	167	DESA RATERORU	217	DESA WAJAKEA JAYA		
18	DESA DETUMBWEWA	68	DESA LISE PU'U	118	DESA NGALUKOJA	168	DESA RATERUA	218	DESA WAKA		
19	DESA DETUPERA	69	DESA LISEDETU	119	DESA NGALUPOLO	169	DESA RATEWATI	219	DESA WATUKAMBA		
20	DESA DETUSOKO BARAT	70	DESA LISEKURU	120	DESA NGALUROGA	170	DESA RATEWATI SELATAN	220	DESA WATUMITE		
21	DESA DETUWULU	71	DESA LISELANDE	121	DESA NGGELA	171	DESA REDORORY	221	DESA WATUNGGERE		
22	DESA DILE	72	DESA LISELOWOBORA	122	DESA NGGESA	172	DESA REKA	222	DESA WATUNGGERE MARILONGA		
23	DESA EKOAE	73	DESA LOBONIKI	123	DESA NGGESABIRI	173	DESA RENDORATERUA	223	DESA WATURAKA		
24	DESA EKOLEA	74	DESA LUNGARIA	124	DESA NGGOREA	174	DESA RENGGA MENGE	224	DESA WATUSIPI		
25	DESA EMBU NGENA	75	DESA MAGEKAPA	125	DESA NGGUMBELAKA	175	DESA RIARAJA	225	DESA WAWONATO		
26	DESA EMBUNDOA	76	DESA MALAWARU	126	DESA NGGUWA	176	DESA RINDIWAWO	226	DESA WELAMOSA		
27	DESA EMBURIA	77	DESA MANULANDO	127	DESA NIDA	177	DESA ROA	227	DESA WEWARIA		
28	DESA EMBUTHERU	78	DESA MAUBASA	128	DESA NILA	178	DESA ROGA	228	DESA WIWIPEMO		
29	DESA EMBUZOZO	79	DESA MAUBASA BARAT	129	DESA NIOPANDA	179	DESA ROMAREA	229	DESA WOLOARA, KECAMATAN LIO TIMUR		
30	DESA FATAATU	80	DESA MAUBASA TIMUR	130	DESA NIOWULA	180	DESA RORURANGGA	230	DESA WOLOARA, KECAMATAN KELIMUTU		
31	DESA FATAATU TIMUR	81	DESA MAUROLE	131	DESA NIRAMESI	181	DESA RUKURAMBA	231	DESA WOLOAU		
32	DESA FATAMARI	82	DESA MAUROLE SELATAN	132	DESA NIRANUSA	182	DESA RUTUJEJA	232	DESA WOLOFEO		
33	DESA GHEOGHOMA	83	DESA MAUSAMBI	133	DESA NUA LIMA	183	DESA SAGA	233	DESA WOLOGAI, KECAMATAN ENDE		
34	DESA GOLULADA	84	DESA MAUTENDA	134	DESA NUAJA	184	DESA SANGGARHORHO	234	DESA WOLOGAI, KECAMATAN DETUSOKO		
35	DESA HANGALANDE	85	DESA MAUTENDA BARAT	135	DESA NUALISE	185	DESA SERANDORI	235	DESA WOLOGAI DUA		
36	DESA HOBATUA	86	DESA MBEWAWORA	136	DESA NUAMULU	186	DESA SAPIJENA	236	DESA WOLOGAI TENGAH		
37	DESA JA MOKE ASA	87	DESA MBOBHENGA	137	DESA NUAMURI	187	DESA SOKORIA	237	DESA WOLOGAI TIMUR		
38	DESA JEGHARANGGA	88	DESA MBOMBA	138	DESA NUAMURI BARAT	188	DESA SOKORIA SELATAN	238	DESA WOLOKARO		
39	DESA JEJARAJA	89	DESA MBOTULAKA	139	DESA NUANAGA	189	DESA TANA LO'O	239	DESA WOLOKELO		
40	DESA JEMBUREA	90	DESA MBOTUTENDA	140	DESA NUANGENDA	190	DESA TANALANGI	240	DESA WOLOKOLI		
41	DESA JEO DU'A	91	DESA MBULILOO	141	DESA NUAONE	191	DESA TANALI	241	DESA WOLOKOTA		
42	DESA JOPU	92	DESA MBULIWARALAU	142	DESA NUMBA	192	DESA TANAROGA	242	DESA WOLOLELA A		
43	DESA KALITEMBU	93	DESA MBULIWARALAU UTARA	143	DESA ONDOREA	193	DESA TANAZOZO	243	DESA WOLOMAGE		
44	DESA KAMUBHEKA	94	DESA MOLE	144	DESA ONDOREA BARAT	194	DESA TANIWODA	244	DESA WOLOMASI		
45	DESA KANGANARA	95	DESA MUKUREKU	145	DESA OTOGEDU	195	DESA TENDA	245	DESA WOLOMUKU		
46	DESA KAZO KAPO	96	DESA MUKUREKU SA'ATE	146	DESA PADERAPE	196	DESA TENDA ONDO	246	DESA WOLOOJA		
47	DESA KEBESANI	97	DESA MUKUSAKI	147	DESA PEMO	197	DESA TENDAMBIPA	247	DESA WOLOSAMBI		
48	DESA KEBIRANGGA	98	DESA MUNDINGGASA	148	DESA PENGGAJAWA	198	DESA TENDAMBONGGI	248	DESA WOLOSOKO		
49	DESA KEBIRANGGA SELATAN	99	DESA NABE	149	DESA PEOZAKARAMBA	199	DESA TENDAREA	249	DESA WOLOTOTO		
50	DESA KEBIRANGGA TENGAH	100	DESA NAKAMBARA	150	DESA PISE	200	DESA TIMBARIA	250	DESA WOLOTOTO TENGAH		

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1	DESA ABI	51	DESA FATUMNASI, KECAMATAN FATUMNASI	101	DESA LINAMNUTU	151	DESA NOINBILA	201	DESA PENE SELATAN	251	DESA TUAKOLE
2	DESA AJAOBAKI	52	DESA FATUMNASI, KECAMATAN NOEBANA	102	DESA LOBUS	152	DESA NUALUNAT	202	DESA PENE UTARA	252	DESA TUAPAKAS
3	DESA ANIN	53	DESA FATUMNUTU	103	DESA LOLI	153	DESA NUAPIN	203	DESA PIKA	253	DESA TUASENE
4	DESA BABUIN	54	DESA FATUTNANA	104	DESA LOTAS	154	DESA NULE	204	DESA PILLI	254	DESA TUATAUM
5	DESA BAKI	55	DESA FATUULAN	105	DESA MANUFUI	155	DESA NUNBENA	205	DESA PISAN	255	DESA TUBLOPO
6	DESA BALU	56	DESA FENUN	106	DESA MAULEUM	156	DESA NUNBENA	206	DESA POLI	256	DESA TUBMONAS
7	DESA BASMUTI	57	DESA FETO MONE	107	DESA MAUNUM NIKI-NIKI	157	DESA NUNFUTU	207	DESA POLLO	257	DESA TUBUHUE
8	DESA BATNUN	58	DESA FOTILO	108	DESA MELLA	158	DESA NUNKOLO	208	DESA PUBASU	258	DESA TUMU, KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
9	DESA BAUS	59	DESA HALME	109	DESA MEUSIN	159	DESA NUNLE"U	209	DESA PUNA	259	DESA TUMU, KECAMATAN AMANATUN UTARA
10	DESA BELLE	60	DESA HANE	110	DESA MILLI	160	DESA NUNUKHNITI	210	DESA PUSU	260	DESA TUNBES
11	DESA BENA	61	DESA HAUMENI	111	DESA MIO	161	DESA NUNUNAMAT	211	DESA PUTUN	261	DESA TUNE
12	DESA BENAHE	62	DESA HAUMENI BAKI	112	DESA MNELAANEN	162	DESA NUNUSUNU	212	DESA SABNALA	262	DESA TUNIS
13	DESA BENLUTU	63	DESA HAUNOBENAK	113	DESA MNELALETE	163	DESA NUSA	213	DESA SABUN	263	DESA TUNUA
14	DESA BESANA	64	DESA HOI	114	DESA MNELAPETU	164	DESA OBAKI	214	DESA SAENAM	264	DESA TUPAN
15	DESA BESLE"U	65	DESA HOIBETI	115	DESA MNESATBUBUK	165	DESA O"BESI	215	DESA SAHAN	265	DESA TUTEM
16	DESA BESNAM	66	DESA HOINENO	116	DESA MUNA	166	DESA OE UE	216	DESA SAINONI	266	DESA USAPIMNASI
17	DESA BESTOBE	67	DESA HUETALAN	117	DESA MUTIS	167	DESA OEBAKI	217	DESA SALBAIT		
18	DESA BIJAEPUNU	68	DESA IUSMOLO	118	DESA NAIFATU	168	DESA OEVELO	218	DESA SANBET		
19	DESA BIJELI	69	DESA KAENENO	119	DESA NAILE"U	169	DESA OEBO	219	DESA SANTIAN		
20	DESA BIKEKNENO	70	DESA KAKAN	120	DESA NAIP	170	DESA OEBOBO	220	DESA SAUBALAN		
21	DESA BILEON	71	DESA KELLE	121	DESA NAKFUNU	171	DESA OE"EKAM, KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	221	DESA SEBOT		
22	DESA BILLA	72	DESA KELLE TUNAN	122	DESA NANO	172	DESA OE"EKAM, KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	222	DESA SE"1		
23	DESA BILOTO	73	DESA KESETNANA	123	DESA NAPI	173	DESA OE"EKAM, KECAMATAN NOEBEBA	223	DESA SILLU		
24	DESA BINAUS	74	DESA KIKI	124	DESA NASI	174	DESA OEHAN	224	DESA SINI		
25	DESA BINENOK	75	DESA KIUBAAT	125	DESA NAUKAE	175	DESA OEHELA	225	DESA SKINU		
26	DESA BISENE	76	DESA KIUFATU	126	DESA NEFOKOKO	176	DESA OEKIU	226	DESA SNOK		
27	DESA BOENTUKA	77	DESA KOA	127	DESA NEKE	177	DESA OEL UBAN	227	DESA SONO		
28	DESA BOKING	78	DESA KOKFE"U	128	DESA NEKEMUNIFETO	178	DESA OELBUBUK	228	DESA SOPO		
29	DESA BOKONG	79	DESA KOKOI	129	DESA NEKMESE	179	DESA OEL"EKAM	229	DESA SPAHA		
30	DESA BONE	80	DESA KOLBANO	130	DESA NENAS	180	DESA OELEON	230	DESA SUNI		
31	DESA BONLEU	81	DESA KOLOTO	131	DESA NENOAT	181	DESA OELET	231	DESA SUNU		
32	DESA BOSEN	82	DESA KONBAKI	132	DESA NENOTES	182	DESA OELEU, KECAMATAN TOIANAS	232	DESA SUPUL		
33	DESA BOTI	83	DESA KOT"OLIN	133	DESA NETPALA	183	DESA OELEU, KECAMATAN KOLBANO	233	DESA TAEBESA		
34	DESA ELLO	84	DESA KUALE"U	134	DESA NETUTNANA	184	DESA OELNUNUH	234	DESA TAEBONE		
35	DESA ENO NABUASA	85	DESA KUALEU	135	DESA NIFUKANI	185	DESA OEMAMAN	235	DESA TAIFTOB		
36	DESA ENO NAPI	86	DESA KUALIN	136	DESA NIFUKIU	186	DESA OENAI	236	DESA TANEOTOB		
37	DESA ENO NETEN	87	DESA KUANFATU	137	DESA NIFULEO	187	DESA OENINO	237	DESA TAUANAS		
38	DESA ENONEONTES	88	DESA KUANOEL	138	DESA NIFULINAH	188	DESA OEPLIKI	238	DESA TAUPI		
39	DESA EONBESI	89	DESA KUATAE	139	DESA NIKI NIKI UN	189	DESA OETUKE	239	DESA TEAS		
40	DESA FAE	90	DESA KUSI	140	DESA NITI	190	DESA OFU	240	DESA TELUK		
41	DESA FALAS	91	DESA KUSI UTARA	141	DESA NOBI-NOBI	191	DESA OINLASI, KECAMATAN MOLLO SELATAN	241	DESA TESIAYOFANU		
42	DESA FAT	92	DESA LAKAT	142	DESA NOEBANA	192	DESA OINLASI, KECAMATAN KIE	242	DESA TETAF		
43	DESA FATU MANUFUI	93	DESA LANU	143	DESA NOEBEBA	193	DESA OINLASI, KECAMATAN AMANATUN SELATAN	243	DESA TLIU		
44	DESA FATU ONI	94	DESA LAOB	144	DESA NOEBESA	194	DESA OLAIS	244	DESA TOBU		
45	DESA FATUAT	95	DESA LASI	145	DESA NOEBESI	195	DESA ONI	245	DESA TO"FEN		
46	DESA FATUKOKO	96	DESA LEOBATAN	146	DESA NOEMETO	196	DESA O"OBIBI	246	DESA TO"1		
47	DESA FATUKOPA	97	DESA LOBOKO	147	DESA NOEMUKE	197	DESA O"OF	247	DESA TOIANAS		
48	DESA FATUKOTO	98	DESA LEONMENI	148	DESA NOENONI	198	DESA OP	248	DESA TOINEKE		
49	DESA FATUKUSI	99	DESA LILL ANA	149	DESA NOEOLIN	199	DESA PANA	249	DESA TO"MANAT		
50	DESA FATULUNU	100	DESA LILO	150	DESA NOESIU	200	DESA PANITE	250	DESA TUAFANU		



**BLU DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA "BAIK"  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama BUMN/Anak Perusahaan	ICORPAC			GCG		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI			IEPK		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Klaster Badan Layanan Umum</b>														
1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang	-	-	-	-	-	-	3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Bhayangkara Kupang	-	-	-	-	-	-	3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-

**DESA YANG TELAH MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI  
TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
	<b>KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</b>	
1	BATU PUTIH	1 Benlutu
		2 Boentuka
		3 Hane
		4 Oebobo
		5 Tupan
		6 Oehela
2	AMANUBAN SELATAN	7 Pollo
		8 Oekiu
		9 Oebelo
		10 Linamnutu
		11 Mio
		12 Batnun
		13 Bena
		14 Enoneten
3	KUALIN	15 Kualin
		16 Oni
		17 Tuapakas
		18 Tuafanu
		19 Kiufatu
		20 Oemaman
4	KOLBANO	21 Kolbano
		22 Oetuke
		23 Se'i
		24 Pana

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
	<b>KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</b>	
		25 Haunobenak
		26 Spaha
5	KOT'OLIN	27 Kot'olin
		28 Fatuat
		29 Hoibeti
		30 Panite
		31 O'Obibi
6	KUANFATU	32 Lasi
		33 Basmuti
		34 Kusi
		35 Kuanfatu
		36 Kelle
		37 Taupi
		38 Kusi Utara
		39 Noebeba
		40 Oehan
7	AMANUBAN BARAT	41 Tublopo
		42 Nulle
		43 Nusa
		44 Mnelalete
		45 Pusu
		46 Tubuhue
		47 Haumenbaki
		48 Nifukani
8	AMANUBAN TENGAH	49 Nakfunu
		50 Baki
		51 Sopo

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
	<b>KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</b>	
		52 Bone
		53 Maunum Niki-niki
9	KUATNANA	54 Naukae
		55 Supul
		56 Lakat
		57 Enonenotes
		58 Tubmonas
		59 Oe'ue
10	NOEBEBA	60 Oe'ekam
11	AMANATUN SELATAN	61 Oinlasi
		62 Sunu
		63 Anin
		64 To'i
		65 Netutnana
12	AMANUBAN TIMUR	66 Oelet
		67 Pisan
		68 Teluk
13	KI'E	69 Falas
		70 Belle
		71 Napi
		72 Fatu'ulan
		73 Oinlasi
		74 Nekmese
		75 Naile'u
14	FATUKOPA	76 Besnam
		77 Nunfutu
15	KOKBAUN	78 Sapnala
		79 Niti
16	TOIANAS	80 Oeleu
17	BOKING	81 Baus

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	
		82 Meusin